PEDOMAN

RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM DAN ANGGARAN KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

Jakarta, Desember 2016

KATA SAMBUTAN

Sejalan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, BKKBN tidak hanya mempunyai tugas fungsi penyelenggaraan bidang KB saja tetapi juga mencakup bidang penyerasian kebijakan kependudukan dan peningkatan penyediaan data dan informasi. Serta Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, menunjukkan bahwa Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga masih tetap menjadi perhatian dan komitmen Pemerintah.

Perkembangan program yang pesat dengan ruang lingkup dan dimensi yang semakin luas, serta makin kompleknya tantangan yang dihadapi menuntut upaya pengerahan potensi yang ada, baik berupa dana, daya, sarana, maupun kemampuan manajemen untuk mencapai tujuan program secara efektif dan efisien. Salah satu pendekatan atau strategi yang ditempuh adalah dengan menyelenggarakan analisis dan evaluasi perkembangan Program dan Anggaran KKBPK melalui kegiatan Rapat Pengendalian Program dan Anggaran (Radalgram) KKBPK.

Agar perkembangan Program dan Anggaran KKBPK dapat terus diikuti, maka kegiatan Radalgram KKBPK harus dapat menampung adanya perubahan dan perkembangan program tersebut. Berkaitan dengan itu, diperlukan **Pedoman Rapat Pengendalian Program dan Anggaran KKBPK** agar searah dengan visi dan misi program. Analisis dan evaluasinya pun perlu dilakukan melalui suatu cara atau metoda analisis dan evaluasi yang ditekankan pada berbagai aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan operasional di lapangan.

Melalui kesempatan ini, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak, khususnya kepada Kelompok Kerja yang telah memberi masukan dan saran serta telah bekerja keras menjalankan tugas hingga tersusunnya **Pedoman Rapat Pengendalian Program dan Anggaran KKBPK** dengan baik. Semoga Allah SWT, meridhoi usaha kita bersama.

Jakarta, Desember 2016
Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan
dan Informasi,

dr. Abidinsyah Siregar, DHSM., M.Kes

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan Rahmat, Inayah, Taufik dan Hidayah-Nya sehingga **Pedoman Rapat Pengendalian Program dan Anggaran KKBPK** dapat terselesaikan. Semoga Pedoman ini dapat dipergunakan sebagai acuan seluruh pihak yang terkait Program KKBPK.

Rapat Pengendalian Program dan Anggaran (Radalgram) KKBPK diadakan sejalan dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga. Selain itu, tercantum juga dalam Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. Sebagai langkah lanjut, maka arah kebijakan dan strategi nasional dalam pembangunan kependudukan dan keluarga berencana dalam RPJMN 2015-2019 adalah salah satunya difokuskan kepada peningkatan ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan yang memadai, akurat dan tepat waktu.

Kegiatan Radalgram KKBPK selalu berusaha menyajikan informasi terpilih secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan tuntutan perkembangan program; mengidentifikasi berbagai masalah dan hambatan yang terjadi; serta memberikan masukan bagi solusi pemecahannya. Dengan cara ini diharapkan hasil Radalgram KKBPK dapat dimanfaatkan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah memberikan masukan baik saran maupun koreksi terhadap terbitnya **Pedoman Rapat Pengendalian Program dan Anggaran KKBPK**, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, Desember 2016
Direktur Pelaporan dan Statistik,

Drs. Rudy Budiman

DAFTAR ISI

Halaman

KATA SAMBUTAN ..... **i**

KATA PENGANTAR ..... **iii**

DAFTAR ISI ..... **v**

PERATURAN KEPALA BKKBN ..... **vii**

BAB I PENDAHULUAN **1**
- A. Latar Belakang 1
- B. Tujuan 2
- C. Sasaran Pengguna 3
- D. Ruang Lingkup 3
- E. Batasan dan Pengertian 3

BAB II KEBIJAKAN DAN STRATEGI **7**
- A. Kebijakan 7
- B. Strategi 7

BAB III KEGIATAN RADALGRAM KKBPK **9**
- A. Langkah Kegiatan Radalgram KKBPK 9
- B. Pokok Kegiatan Radalgram KKBPK 14
- C. Penyajian Radalgram KKBPK 22
- D. Analisis Sederhana Data Program dan Anggaran KKBPK 23
- E. Rumusan Masalah dan Tindak Lanjut 23
- F. Monitoring dan Evaluasi 24

BAB IV PENUTUP **27**

LAMPIRAN

PERATURAN
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NOMOR: 445 /PER/G4/2016

TENTANG

PEDOMAN
RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM DAN ANGGARAN KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

Menimbang :

a. bahwa dalam upaya meningkatkan keberhasilan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang dilakukan secara terencana, terpadu dan terstandardisasi yang menjamin kesamaan dan keseragaman pelaksanaan Rapat Pengendalian Program dan Anggaran Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga;

b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan unit kerja terkait dalam melaksanakan Rapat Pengendalian Program dan Anggaran Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai Pedoman Rapat Pengendalian Program dan Anggaran Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga dengan cara dan metode yang baku, terstandar dan mengikat semua unit kerja di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

tentang Pedoman Rapat Pengendalian Program dan Anggaran Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);

3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

4. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

5. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;

6. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 92/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana;

7. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 102/PER/B4/2011 tentang Pedoman Tata Naskah

Dinas di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

8. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 212/PER/B4/2012 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Pedoman di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PEDOMAN RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM DAN ANGGARAN KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA.

KESATU Pedoman Rapat Pengendalian Program Dan Anggaran Kependudukan, Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan pedoman dan atau acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berancana Nasional terkait pelaksanaan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.

KEDUA Pada saat Peraturan ini berlaku, semua peraturan yang berupa pedoman, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang telah ada dan sedang berlaku di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional berdasarkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berecana Nasional Nomor 337/HK-010/B5/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Perangkat Tata

Laksanan Program KB Nasional di Lingkungan BKKBN, Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 102/PER/B5/2011 tentang Pedoman tata Naskah Dinas di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dan Peraturan Kepala Nomor 212/PER/B4/2012 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Pedoman di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dinyatakan masih berlaku selama belum ada peraturan penggantinya.

KETIGA Dengan berlakunya peraturan ini, peraturan yang berkaitan dengan pencatatan dan pelaporan dinyatakan tetap berlaku selama belum ada peraturan penggantinya.

KEEMPAT Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 2 Desember 2016

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL

SURYA CHANDRA SURAPATY

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berbagai perubahan lingkungan strategis baik nasional, regional maupun internasional, telah memberi pengaruh pula dalam pelaksanaan Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga di Indonesia. Perubahan paradigma kependudukan dan pembangunan keluarga, serta tuntutan perubahan di tanah air telah memberi nuansa baru dan perubahan mendasar dalam pengelolaan dan pelaksanaan Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga di Indonesia. Dengan berbagai perubahan dukungan strategi tersebut, maka telah dilakukan amandemen Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 di DPR, sehingga pada tahun 2009 terbit Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Dalam undang-undang ini, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mempunyai tugas dan fungsi tidak hanya di ruang lingkup penyelenggaraan bidang keluarga berencana saja, tetapi juga mencakup bidang kependudukan. Undang-Undang tersebut diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga, yang menyebutkan bahwa pengumpulan data dan informasi keluarga dilaksanakan melalui salah satu kegiatan yaitu pengelolaan data rutin pelayanan Keluarga Berencana (KB). Ha ini dipertegas kembali dengan terbitnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Lampiran: I huruf N. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Sub Urusan 2. Keluarga Berencana, poin d: Pengelolaan dan pengendalian sistem informasi keluarga.

Dalam era reformasi, Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga masih tetap menjadi perhatian dan komitmen Pemerintah, sehingga program ini masih tercantum dan diamanatkan pula dalam Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. Sebagai langkah lanjut, maka arah kebijakan dan strategi nasional dalam pembangunan kependudukan dan keluarga berencana dalam RPJMN 2015-2019 adalah salah satunya difokuskan kepada peningkatan ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan yang memadai, akurat dan tepat waktu.

Sementara itu, perkembangan program yang pesat dengan ruang lingkup dan dimensi yang semakin luas, serta makin kompleknya tantangan yang dihadapi

menuntut upaya pengerahan potensi yang ada, baik berupa dana, daya, sarana, maupun kemampuan manajemen untuk mencapai tujuan program secara efektif dan efisien. Salah satu pendekatan atau strategi yang ditempuh adalah dengan menyelenggarakan analisis dan evaluasi perkembangan Program dan Anggaran KKBPK melalui kegiatan Rapat Pengendalian Program dan Anggaran (Radalgram) KKBPK.

Kegiatan Radalgram KKBPK selalu berusaha menyajikan informasi terpilih secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan tuntutan perkembangan program; mengidentifikasi berbagai masalah dan hambatan yang terjadi; serta memberikan masukan bagi solusi pemecahannya. Dengan cara ini diharapkan hasil Radalgram KKBPK dapat dimanfaatkan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan.

Agar perkembangan Program dan Anggaran KKBPK dapat terus diikuti, maka kegiatan Radalgram KKBPK harus dapat menampung adanya perubahan dan perkembangan program tersebut. Berkaitan dengan itu, perlu dilakukan penyusunan Pedoman Radalgram KKBPK agar searah dengan visi dan misi program. Analisis dan evaluasinya pun perlu dilakukan melalui suatu cara atau metoda analisis dan evaluasi yang ditekankan pada berbagai aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan operasional di lapangan.

B. TUJUAN

Tujuan penyusunan dan penerbitan Pedoman Radalgram KKBPK dapat dijelaskan secara umum dan khusus sebagai berikut :

1. UMUM

Tersedianya pedoman pelaksanaan Radalgram KKBPK bagi pengelola data tingkat pusat hingga kabupaten dan kota yang meliputi persiapan sampai dengan pelaksanaan kegiatan.

2. KHUSUS

a. Tersedianya petunjuk mengenai hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam pelaksanaan Radalgram KKBPK
b. Tersedianya petunjuk mengenai pelaksanaan Radalgram KKBPK
c. Terwujudnya persamaan indikator-indikator program dan anggaran KKBPK yang akan disajikan dalam Radalgram KKBPK

C. SASARAN PENGGUNA

1. BKKBN.
2. Perwakilan BKKBN Provinsi.
3. SKPD-KB Kabupaten dan kota.

D. RUANG LINGKUP

Pedoman Radalgram KKBPK meliputi langkah-langkah kegiatan dan pokok-pokok kegiatan Radalgram KKBPK. Secara rinci yaitu mekanisme pelaksanaan Radalgram KKBPK serta data dan informasi perkembangan Program dan Anggaran KKBPK. Pengelola data tingkat pusat hingga kabupaten dan kota yang melakukan Radalgram KKBPK, adalah:

1. Tingkat Pusat
   Unit kerja di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

2. Tingkat Provinsi
   Perwakilan BKKBN Provinsi.

3. Tingkat Kabupaten dan Kota
   SKPD-KB Kabupaten dan Kota.

E. BATASAN DAN PENGERTIAN

Untuk standarisasi dan keseragaman pengertian istilah di dalam buku Pedoman ini, diberikan batasan dan pengertian sebagai berikut:

1. Kelompok Kegiatan (Poktan) adalah wadah kegiatan Program KKBPK yang berkaitan dengan Penundaan Usia Perkawinan, Pengaturan Kelahiran, Pembinaan Ketahanan Keluarga dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga.

   a. Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB) merupakan wadah kegiatan beranggotakan keluarga yang memiliki anak balita untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orangtua dan atau anggota keluarga lainnya dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak balita melalui rangsangan/stimulasi baik secara fisik, mental, sosial emosional dan intelektualnya.

      Anggota BKB aktif, adalah orangtua dan atau anggota keluarga lainnya yang hadir dalam pertemuan kelompok BKB.

b. Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR), adalah wadah kegiatan beranggotakan keluarga yang memiliki anak dan remaja untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orangtua dan atau anggota keluarga lainnya dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak dan remaja melalui komunikasi efektif antara orang tua dan anak remaja.

   Anggota BKR Aktif, adalah orangtua dan atau anggota keluarga lainnya yang hadir dalam pertemuan kelompok BKR.

c. Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Lanjut Usia (BKL), merupakan kelompok kegiatan untuk membina keluarga lansia dalam upaya meningkatkan kepedulian dan peran keluarga dalam mewujudkan lanjut usia yang sehat, mandiri, produktif, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

   Anggota BKL Aktif, adalah orangtua dan atau anggota keluarga lainnya yang hadir dalam pertemuan kelompok BKL.

3. Angka Prevalensi Kontrasepsi (Contraceptive Prevalence Rate/CPR) adalah Persentase pasangan usia subur (PUS) yang sedang menggunakan alat/cara KB

4. Peserta KB Baru adalah pasangan usia subur yang baru pertama kali menggunakan alat/obat/cara kontrasepsi dan atau pasangan usia subur yang kembali menggunakan alat/obat/cara kontrasepsi setelah melahirkan/ keguguran.

5. Peserta KB Aktif adalah peserta KB yang sedang menggunakan salah satu alat/obat/cara kontrasepsi secara terus menerus tanpa diselingi kehamilan.

6. Metoda Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) adalah Metode kontrapsesi jangka panjang yaitu : IUD, Implant/susuk KB, Medis operasi pria dan wanita

7. Pasangan Usia Subur (PUS) adalah Pasangan suami istri yang istrinya berumur antara 15-49 tahun, dan secara operasional pula pasangan suami istri yang istri berumur kurang dari 15 tahun dan telah kawin atau istri berumur lebih dari 49 tahun tetapi belum menopause.

8. Komplikasi adalah gangguan kesehatan yang dialami oleh peserta KB sebagai akibat dari pemakaian alat kontrasepsi, komplikasi dibedakan kedalam 2 macam komplikasi yaitu:
   a. komplikasi berat adalah gangguan kesehatan akibat pemakaian alat kontrasepsi yang harus dilayani secara intensif dan perlu perawatan.
   b. komplikasi ringan adalah gangguan kesehatan akibat pemakaian alat kontrasepsi yang harus dilayani lebih lanjut, karena tidak perlu perawatan.

9. Kegagalan adalah terjadinya kehamilan pada saat menggunakan alat atau obat kontrasepsi secara benar.

10. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Menteri/Pimpinan Lembaga atau Satuan Kerja (satker) serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran negara dan pencairan dana atas beban APBN serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah.

11. Belanja Modal adalah pengeluaran untuk pembayaran perolehan aset tetap dan/atau aset lainnya atau menambah nilai aset tetap dan/atau aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap/aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Dalam pembukuan nilai perolehan asset dihitung semua pendanaan yang dibutuhkan hingga aset tersebut tersedia dan siap digunakan. Aset tetap/aset lainnya tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu Satker atau dipergunakan oleh masyarakat/publik, tercatat sebagai aset K/L terkait dan bukan dimaksudkan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/Pemda. Belanja Modal terdiri atas Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan.

12. Belanja Pegawai adalah komponen terhadap pegawai baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah dalam dan luar negeri, baik kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dikerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS maupun kepada non PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas fungsi unit organisasi pemerintah, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal dan/atau kegiatan yang mempunyai keluaran (output) dalam kategori belanja barang. Belanja Pegawai terdiri atas belanja gaji dan tunjangan, belanja honorarium/vakasi/lembur/tunjangan khusus, belanja kontribusi sosial dan belanja pegawai transito.

13. Belanja Barang dan Jasa adalah pengeluaran untuk pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat/Pemerintah Daerah (Pemda) dan belanja perjalanan. Dalam pengertian belanja tersebut termasuk honorarium dan vakasi yang diberikan dalam rangka pelaksanaan kegiatan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa. Belanja Barang terdiri atas Belanja Barang (Operasional dan Non-Operasional), Belanja Jasa, Belanja Pemeliharaan, Belanja Perjalanan, Belanja Badan Layanan Umum (BLU), serta Belanja Barang Untuk Diserahkan KepadaMasyarakat/Pemda.

14. Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Alokasi Anggaran K/L adalah batas tertinggi anggaran yang dialokasikan kepada Kementerian /Lembaga dalam rangka penyusunan RKA-K/L

BAB II
KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Dalam pelaksanaan kegiatan Radalgram KKBPK diperlukan kebijakan dan strategi agar dapat mencapai sasaran sebagaimana yang telah di tetapkan, sebagai berikut :

A. KEBIJAKAN

Kebijakan sebagai dasar rencana dalam melaksanakan kegiatan Radalgram KKBPK adalah :

1. Penetapan langkah-langkah persiapan dan pelaksanaan Radalgram KKBPK
2. Penetapan indikator-indikator program dan anggaran KKBPK
3. Penetapan format laporan Radalgram KKBPK

B. STRATEGI

1. Mempersiapkan kebutuhan sarana dan prasarana pelaksanaan Radalgram KKBPK
2. Mempersiapkan data dan informasi yang dibutuhkan untuk Radalgram KKBPK, baik melalui aplikasi maupun laporan rutin
3. Memilih indikator strategis untuk analisis dan evaluasi program dan anggaran KKBPK
4. Menyusun format baku laporan Radalgram KKBPK sesuai dengan indikator terpilih

BAB III
KEGIATAN RADALGRAM KKBPK

Kegiatan Radalgram KKBPK merupakan salah satu cara untuk memantau kelangsungan program dan anggaran KKBPK di lapangan, khususnya di tingkat provinsi dan kabupaten dan kota. Pedoman Radalgram KKBPK diharapkan dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak di tingkat provinsi dan kabupaten dan kota, khususnya para pengambil kebijakan.

A. LANGKAH KEGIATAN RADALGRAM KKBPK

1. BKKBN Pusat

a. Persiapan

1) BKKBN, dalam hal ini Direktorat Pelaporan dan Statistik, menyiapkan Pedoman Radalgram KKBPK yang berisi tentang mekanisme pelaksanaan Radalgram KKBPK, serta mendistribusikan kepada seluruh komponen di Pusat dan Perwakilan BKKBN Provinsi.

2) BKKBN, dalam hal ini Direktorat Teknologi Informasi dan Dokumentasi, menyiapkan perangkat teknologi untuk kebutuhan pelaksanaan Radalgram, baik secara *video conference* atau tidak. Selain itu, memastikan sarana dan prasarana sistem aplikasi berfungsi dengan baik.

3) BKKBN, Direktorat Pelaporan dan Statistik menyiapkan data dan informasi Program KKBPK yang diperoleh melalui sistem aplikasi secara otomatis. Jika terdapat indikator tambahan maka tabulasi data dapat diperoleh melalui aplikasi tersebut. Ketetapan pengambilan data mengikuti sistem pencatatan dan pelaporan yang berlaku.

4) BKKBN, Biro Keuangan dan BMN menyiapkan data dan informasi Realisasi Anggaran KKBPK dan Stok Alat Kontrasepsi yang diperoleh melalui satker pusat dan satker perwakilan provinsi sesuai sistem pelaporan keuangan yang berlaku.

5) Menyiapkan data dan informasi pendukung lainnya dari masing-masing komponen terkait.

b. Penyelesaian Bahan

1) Melakukan pengolahan data dan informasi program dan anggaran KKBPK serta data dan informasi pendukung lainnya paling lambat satu minggu setelah data dan informasi program dan anggaran KKBPK diperoleh.

2) Bahan yang dimaksudkan dapat berupa paparan atau narasi atau hasil tabulasi

c. Pelaksanaan dan Pengorganisasian

1) Radalgram KKBPK dipimpin oleh Kepala BKKBN atau Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang mewakili.

2) Peserta Radalgram KKBPK adalah seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, perwakilan dari Pejabat Fungsional (Widyaiswara, Auditor dan Peneliti) dan seluruh Perwakilan BKKBN Provinsi.

3) Radalgram KKBPK dilakukan **paling lambat minggu keempat** setiap bulan.

4) Materi Radalgram KKBPK disampaikan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan Radalgram KKBPK, sehingga masing-masing pihak terkait dapat menganalisis, memverifikasi dan merencanakan tindak lanjut.

5) Penyajian materi Analisis dan Evaluasi Program KKBPK disampaikan oleh Direktur Pelaporan dan Statistik atau pejabat lain yang diberikan tugas.

6) Penyajian materi Realisasi Anggaran KKBPK dan Stok Alat Kontrasepsi disampaikan oleh Kepala Biro Keuangan dan BMN atau pejabat lain yang diberikan tugas.

7) Penyajian materi pendukung disampaikan oleh pejabat bersangkutan.

2. Perwakilan BKKBN Provinsi

a. Persiapan

1) Perwakilan BKKBN Provinsi, dalam hal ini Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi, mendistribusikan Pedoman Radalgram KKBPK kepada SKPD-KB Kabupaten dan Kota.

2) Menyiapkan data dan informasi Program KKBPK yang diperoleh melalui sistem aplikasi secara otomatis. Jika terdapat indikator tambahan maka tabulasi data dapat diperoleh melalui aplikasi tersebut. Ketetapan pengambilan data mengikuti sistem pencatatan dan pelaporan yang berlaku.

3) Menyiapkan data dan informasi Realisasi Anggaran KKBPK dan Stok Alat Kontrasepsi yang diperoleh melalui kasubbag keuangan provinsi dan bendahara materiil dengan ketetapan data diperoleh minggu kedua.

4) Menyiapkan data dan informasi pendukung lainnya dari masing-masing komponen bersangkutan

b. Penyelesaian Bahan

1) Melakukan pengolahan data dan informasi program dan anggaran KKBPK serta data dan informasi pendukung lainnya paling lambat satu minggu setelah data dan informasi program dan anggaran KKBPK diperoleh.

2) Bahan yang dimaksudkan dapat berupa paparan atau narasi atau hasil tabulasi

c. Pelaksanaan dan Pengorganisasian

1) Radalgram KKBPK dipimpin oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi atau Pejabat Administrator Perwakilan BKKBN Provinsi yang mewakili.

2) Peserta Radalgram KKBPK adalah seluruh Pejabat Administrator, seluruh Pejabat Pengawas, Pengelola Anggaran (Pejabat Penanda tangan Surat Perintah Membayar, Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Petugas Pengelola Administrasi Belanja

Pegawai dan Bendahara Materiil), perwakilan dari Pejabat Fungsional (Widyaiswara, Auditor dan Peneliti) Perwakilan BKKBN Provinsi dan seluruh SKPD-KB Kabupaten dan Kota.

3) Radalgram KKBPK dilakukan **paling lambat minggu ketiga** setiap bulan.

4) Materi Radalgram KKBPK disampaikan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan Radalgram KKBPK, sehingga masing-masing pihak terkait dapat menganalisis, memverifikasi dan merencanakan tindak lanjut.

5) Penyajian materi Analisis dan Evaluasi Program KKBPK disampaikan oleh Kepala Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi atau pejabat lain yang diberikan tugas.

6) Penyajian materi Realisasi Anggaran KKBPK dan Stok Alat Kontrasepsi disampaikan oleh Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi atau pejabat lain yang diberikan tugas.

7) Penyajian materi pendukung disampaikan oleh pejabat bersangkutan.

3. SKPD-KB Kabupaten dan Kota

a. Persiapan

1) Menyiapkan data dan informasi Program KKBPK yang diperoleh melalui sistem aplikasi secara otomatis. Jika terdapat indikator tambahan maka tabulasi data dapat diperoleh melalui aplikasi tersebut. Ketetapan pengambilan data mengikuti sistem pencatatan dan pelaporan yang berlaku.

2) Menyiapkan data dan informasi Realisasi Anggaran KKBPK dan Stok Alat Kontrasepsi yang diperoleh melalui pengelola anggaran

3) Menyiapkan data dan informasi pendukung lainnya dari masing-masing komponen bersangkutan

b. Penyelesaian Bahan

1) Melakukan pengolahan data dan informasi program dan anggaran KKBPK serta data dan informasi pendukung lainnya paling lambat

satu minggu setelah data dan informasi program dan anggaran KKBPK diperoleh.

2) Bahan yang dimaksudkan dapat berupa paparan atau narasi atau hasil tabulasi.

c. Pelaksanaan dan Pengorganisasian

1) Radalgram Daerah KKBPK dipimpin oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Keluarga Berencana (SKPD-KB) Kabupaten dan Kota atau Pejabat Administrator SKPD-KB Kabupaten dan Kota yang mewakili.

2) Peserta Radalgram Daerah KKBPK adalah seluruh Pejabat Administrator, seluruh Pejabat Pengawas, Pengelola Anggaran (Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu), perwakilan dari Pejabat Fungsional (Widyaiswara, Auditor dan Peneliti) SKPD-KB Kabupaten dan Kota dan seluruh UPT KB Kecamatan.

3) Radalgram Daerah KKBPK dilakukan **paling lambat minggu ketiga** setiap bulan.

4) Materi Radalgram Daerah KKBPK disampaikan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan Radalgram Daerah KKBPK, sehingga masing-masing pihak terkait dapat menganalisis, memverifikasi dan merencanakan tindak lanjut.

5) Penyajian materi Analisis dan Evaluasi Program KKBPK disampaikan oleh kepala bagian data dan informasi atau pejabat lain yang diberikan tugas.

6) Penyajian materi Realisasi Anggaran KKBPK dan Stok Alat Kontrasepsi disampaikan oleh Sekretaris Badan atau pejabat lain yang diberikan tugas.

7) Penyajian materi pendukung disampaikan oleh pejabat bersangkutan.

B. POKOK KEGIATAN RADALGRAM KKBPK

1. Proses Identifikasi

Identifikasi indikator-indikator Program KKBPK perlu dilakukan untuk pemetaan komponen sistem pelayanan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga. Dalam pelaksanaan Radalgram KKBPK, pembahasan hanya dilakukan untuk indikator Input, Proses dan Output. Berikut peta indikator Program KKBPK.

Gambar 1. Proses Imput, Proses dan Output Program KKBPK

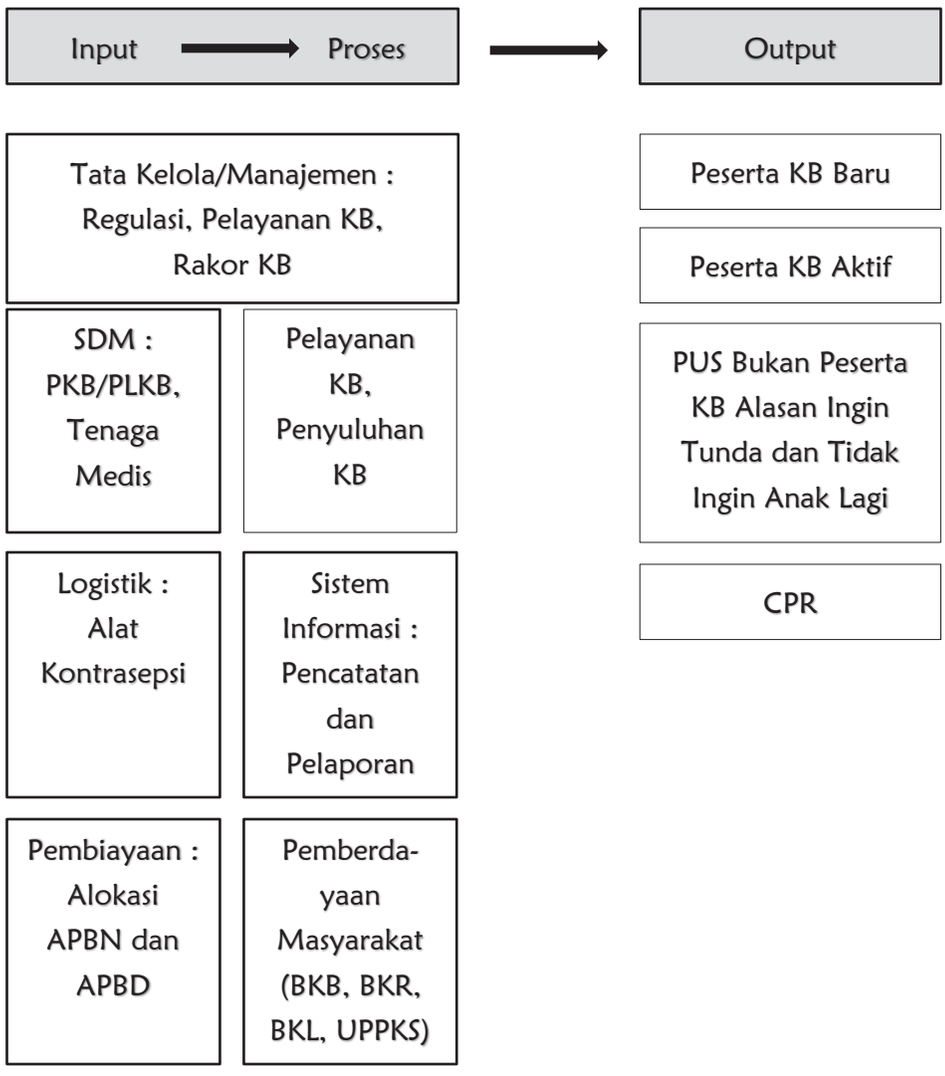

Gambar di atas merupakan sistem penyelenggaraan Program KKBPK yang terdiri dari input, proses dan output. Dengan demikian, evaluasi mengenai bagaimana proses penyelenggaraan Program KKBPK dapat dilakukan melalui pengukuran indikator-indikator tersebut.

2. Indikator Data dan Informasi program dan anggaran KKBPK

Tabel 1. Indikator Data dan Informasi
Program Dan Anggaran KKBPK

No	Indikator
	PROGRAM KKBPK
1	**Indikator Input**
	a. Cakupan Laporan Tempat Pelayanan KB
	b. Cakupan Laporan Data Wilayah dan Institusi KB di Lapangan
	c. Frekuensi Operasional Mupen
	d. Sumber Daya Manusia
	e. Jumlah Persediaan Alat Kontrasepsi Program di Semua Faskes KB
2	**Indikator Proses**
	a. Pembinaan Kelompok Kegiatan (BKB, BKR, BKL)
	b. Frekuensi Operasional Penyuluhan dan KIE KB
	c. Status PUS Anggota Kelompok Kegiatan (BKB, BKR, BKL, UPPKS)
3	**Indikator Output**
	a. Hasil Pelayanan Peserta KB Baru menggunakan Informed Consent
	b. Hasil Pelayanan Peserta KB Baru menurut Metode Kontrasepsi
	c. Hasil Pelayanan Peserta KB Baru terhadap Target
	d. Hasil Pelayanan Peserta KB Aktif menurut Metode Kontrasepsi
	e. Hasil Pelayanan Peserta KB Aktif terhadap Target
	f. Kasus Komplikasi Berat dan Kegagalan menurut Metode Kontrasepsi
	g. Contraceptive Prevalence Rate (CPR)
	h. Kebutuhan KB Tidak Terpenuhi (PUS Bukan Peserta KB Alasan Ingin Tunda dan Tidak Ingin Anak Lagi)
	i. Kesertaan ber-KB Anggota Kelompok Kegiatan (BKB, BKR, BKL, UPPKS)
	REALISASI ANGGARAN dan STOK ALAT KONTRASEPSI
1	**Belanja Total**
2	**Belanja Pegawai**
	a. Realisasi Belanja Pegawai berdasarkan Pagu Belanja Pegawai
	b. Realisasi Belanja Pegawai berdasarkan Pagu Belanja Total

3	**Belanja Barang**
	a. Realisasi Belanja Barang berdasarkan Pagu Belanja Barang
	b. Realisasi Belanja Barang berdasarkan Pagu Belanja Total
4	**Belanja Modal**
	a. Realisasi Belanja Modal berdasarkan Pagu Belanja Modal
	b. Realisasi Belanja Modal berdasarkan Pagu Belanja Total
5	**Perkiraan Kemampuan Persediaan Alat Kontrasepsi**

Catatan: Indikator bisa ditambahkan bila diperlukan.

3. Penghitungan Data Program KKBPK

a. Indikator Input

1) Cakupan Laporan Tempat Pelayanan KB
Sumber Data : Pelayanan KB
Cara Pengukuran :

$$\frac{\text{Jumlah Tempat Pelayanan KB Lapor}}{\text{Jumlah Tempat Pelayanan KB Ada}} \times 100\%$$

2) Cakupan Laporan Data Wilayah dan Institusi KB di Lapangan
Sumber Data : Pengendalian Lapangan
Cara Pengukuran :

$$\frac{\text{Jumlah Data Wilayah dan Institusi KB di Lapangan Lapor}}{\text{Jumlah Data Wilayah dan Institusi KB di Lapangan Ada}} \times 100\%$$

3) Frekuensi Operasional Mupen
Sumber Data : Pengendalian Lapangan
Cara Pengukuran :

$$\frac{\text{Frekuensi Operasional Mupen}}{\text{Jumlah Wilayah}} \times 100\%$$

4) Sumber Daya Manusia
Sumber Data : Pengendalian Lapangan
Cara pengukuran :

$$\frac{\text{Jumlah Sumber Daya Manusia}}{\text{Jumlah Wilayah Binaan}} \text{ x } 100\%$$

5) Jumlah Persediaan Alat Kontrasepsi Program di Semua Faskes KB
Sumber Data : Pelayanan KB
Cara pengukuran :

$$\frac{\text{Jumlah Persediaan Alkon di Semua Faskes KB}}{\text{Pemakaian Rata-rata per Bulan}} \text{ x } 100\%$$

b. Indikator Proses

1) Pembinaan Kelompok Kegiatan (BKB, BKR, BKL)
Sumber Data : Pengendalian Lapangan
Cara pengukuran :

$$\frac{\text{Jumlah Keluarga Anggota Kelompok Kegiatan Hadir dalam Pertemuan}}{\text{Jumlah Keluarga Anggota Kelompok Kegiatan}} \; x \; 100$$

2) Frekuensi Operasional Penyuluhan dan KIE KB
Sumber Data : Pengendalian Lapangan
Cara Pengukuran :

$$\frac{\text{Frekuensi Penyuluhan KB oleh Tenaga Penyuluh}}{\text{Jumlah Desa/Kelurahan}}$$

3) Status PUS Anggota Kelompok Kegiatan (BKB, BKR, BKL, UPPKS)
Sumber Data : Pengendalian Lapangan
Cara Pengukuran :

$$\frac{\text{Jumlah Anggota Kelompok Kegiatan berstatus PUS}}{\text{Jumlah Anggota Kelompok Kegiatan}} \times 100\%$$

c. Indikator Output

1) Hasil Pelayanan Peserta KB Baru menggunakan Informed Consent
Sumber Data : Pelayanan KB

Cara Pengukuran :

$$\frac{\text{Jumlah Peserta KB Baru (PB) menurut Metode Kontrasepsi Menggunakan Informed Consent}}{\text{Jumlah PB Menurut Metode Kontrasepsi}} \times 100\%$$

2) Hasil Pelayanan Peserta KB Baru menurut Metode Kontrasepsi
Sumber Data : Pelayanan KB
Cara Pengukuran :

$$\frac{\text{Jumlah Peserta KB Baru (PB) menurut Metode Kontrasepsi}}{\text{Jumlah PB Total}} \times 100\%$$

3) Hasil Pelayanan Peserta KB Baru terhadap Target
Sumber Data : Pelayanan KB
Cara Pengukuran :

$$\frac{\text{Jumlah Peserta KB Baru (PB)}}{\text{Jumlah Target PB}} \times 100\%$$

4) Hasil Pelayanan Peserta KB Aktif menurut Metode Kontrasepsi
Sumber Data : Pengendalian Lapangan
Cara Pengukuran :

$$\frac{\text{Jumlah Peserta KB Aktif (PA) menurut Metode Kontrasepsi}}{\text{Jumlah PA Total}} \times 100\%$$

5) Hasil Pelayanan Peserta KB Aktif terhadap Target
Sumber Data : Pengendalian Lapangan
Cara Pengukuran :

$$\frac{\text{Jumlah Peserta KB Aktif (PA)}}{\text{Jumlah Target PA}} \times 100\%$$

6) Kasus Komplikasi Berat dan Kegagalan menurut Metode Kontrasepsi
Sumber Data : Pelayanan KB
Cara Pengukuran :

$$\frac{\text{Jumlah Komplikasi Berat/Kegagalan menurut Metode Kontrasepsi}}{\text{Pop at Risk menurut Metode Kontrasepsi}} \times 100\%$$

7) Prevalensi Penggunaan Kontrasepsi (CPR)
Sumber Data : Pelayanan KB
Cara Pengukuran :

$$\frac{\text{Jumlah Peserta KB Aktif (PA)}}{\text{Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)}} \times 100\%$$

8) Kebutuhan KB Tidak Terpenuhi (PUS Bukan Peserta KB Alasan Ingin Tunda dan Tidak Ingin Anak Lagi)
Sumber Data : Pelayanan KB
Cara Pengukuran :

$$\frac{\begin{array}{c}\text{Jumlah PUS Bukan Peserta KB} \\ \text{Alasan Ingin Anak Tunda +} \\ \text{PUS Bukan Peserta KB} \\ \text{Alasan Tidak Ingin Anak Lagi}\end{array}}{\text{Jumlah PUS}} \times 100\%$$

9) Kesertaan ber-KB Anggota Kelompok Kegiatan (BKB, BKR, BKL, UPPKS)
Sumber Data : Pengendalian Lapangan
Cara Pengukuran :

$$\frac{\text{Jumlah PUS Anggota Kelompok Kegiatan yang ber-KB}}{\text{Jumlah PUS Anggota Kelompok Kegiatan}} \times 100\%$$

d. Penghitungan Data Realisasi Anggaran dan Stok Alat Kontrasepsi

1) Belanja Total
Realisasi Belanja Total berdasarkan Pagu Anggaran
Sumber Data :
- BKKBN dan Perwakilan BKKBN Provinsi bersumber dari Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART)
- SKPD-KB Kabupaten dan Kota bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

Cara Pengukuran :

$$\frac{\text{Realisasi Belanja Total}}{\text{Pagu Anggaran Belanja Total}} \times 100\%$$

2) Belanja Pegawai

a) Realisasi Belanja Pegawai berdasarkan Pagu Belanja Pegawai

Sumber Data :

- BKKBN dan Perwakilan BKKBN Provinsi bersumber dari Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART)
- SKPD-KB Kabupaten dan Kota bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

Cara Pengukuran :

$$\frac{\text{Realisasi Belanja Pegawai}}{\text{Pagu Anggaran Belanja Pegawai}} \times 100\%$$

b) Realisasi Belanja Pegawai berdasarkan Pagu Belanja Total

Sumber Data :

- BKKBN Pusat dan Provinsi bersumber dari Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART)
- SKPD-KB Kabupaten dan Kota bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

Cara Pengukuran :

$$\frac{\text{Realisasi Belanja Pegawai}}{\text{Pagu Anggaran Belanja Total}} \times 100\%$$

3) Belanja Barang

a. Realisasi Belanja Barang berdasarkan Pagu Belanja Barang

Sumber Data :

- BKKBN Pusat dan Provinsi bersumber dari Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART)
- SKPD-KB Kabupaten dan Kota bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

Cara Pengukuran :

$$\frac{\text{Realisasi Belanja Barang}}{\text{Pagu Anggaran Belanja Barang}} \times 100\%$$

b. Realisasi Belanja Barang berdasarkan Pagu Belanja Total

Sumber Data :

- BKKBN Pusat dan Provinsi bersumber dari Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART)

- SKPD-KB Kabupaten dan Kota bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

Cara Pengukuran :

$$\frac{\text{Realisasi Belanja Barang}}{\text{Pagu Anggaran Belanja Total}} \times 100\%$$

4) Belanja Modal

a. Realisasi Belanja Modal berdasarkan Pagu Belanja Modal

Sumber Data :

- BKKBN Pusat dan Provinsi bersumber dari Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART)
- SKPD-KB Kabupaten dan Kota bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

Cara Pengukuran :

$$\frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Pagu Anggaran Belanja Modal}} \times 100\%$$

b. Realisasi Belanja Modal berdasarkan Pagu Belanja Total

Sumber Data :

- BKKBN Pusat dan Provinsi bersumber dari Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART)
- SKPD-KB Kabupaten dan Kota bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

Cara Pengukuran :

$$\frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Pagu Anggaran Belanja Total}} \times 100\%$$

5) Perkiraan Kemampuan Persediaan Alkon

Rasio Persediaan Alat Kontrasepsi

Sumber Data : F/V/KB

Cara pengukuran :

$$\frac{\text{Jumlah Persediaan Alkon di Provinsi dan Kabupaten dan kota}}{\text{Pemakaian Rata-rata per Bulan}}$$

C. PENYAJIAN RADALGRAM KKBPK

Penyajian data harus dilakukan secara tepat dan mudah untuk dipahami. Pemilihan metode penyajian data sangat menentukan seberapa besar tingkat pemahaman pembaca. Radalgram KKBPK menyajikan data dengan minimal 3 metode :

1. TABULASI

Tabulasi data adalah penyajian data ke dalam bentuk tabel atau diagram untuk memudahkan pengamatan atau evaluasi. Tabulasi memperlihatkan data yang mencerminkan keadaan sesungguhnya dari suatu wilayah atau suatu kejadian.

2. GRAFIK

a. Grafik Batang

Grafik batang adalah grafik yang penyajian datanya mengunakan batang atau persegi panjang. Grafik batang dipakai untuk memperlihatkan perbedaan tingkat nilai dari beberapa variabel pada suatu data. Grafik batang merupakan grafik yang paling sederhana diantara jenis-jenis grafik lainnya. Karena grafik ini sangat mudah untuk dipahami dan hanya menggambarkan data dalam bentuk batang.

b. Grafik Garis

Grafik garis adalah grafik yang penyajian datanya mengunakan garis atau kurva. Grafik garis banyak digunakan untuk menggambarkan suatu perkembangan atau perubahan dari waktu ke waktu pada sebuah objek yang di teliti.

c. Grafik Lingkaran

Grafik lingkaran adalah grafik yang penyajian datanya mengunakan lingkaran. Grafik lingkaran menggambarkan persentase dari nilai total suatu data. Dalam membuat grafik lingkaran ada beberapa hal yang harus diperhatikan yakni penentuan terlebih dahulu besar persentase tiap objek terhadap keseluruhan data dan kemudian besarnya sudut masing-masing kelompok data.

3. NARASI

Narasi adalah salah satu jenis pengembangan paragraf dalam sebuah tulisan yang rangkaian peristiwa dari waktu ke waktu dijabarkan dengan urutan awal, tengah, dan akhir. Narasi digunakan untuk lebih memperjelas analisis dan evaluasi yang dilakukan.

D. ANALISIS SEDERHANA DATA PROGRAM DAN ANGGARAN KKBPK

Dalam melakukan analisis sederhana data Program dan Anggaran KKBPK, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Analisis dilakukan dengan mengedepankan identifikasi permasalahan dengan pendekatan kewilayahan.

2. Dimulai terhadap indikator output terlebih dahulu untuk menentukan permasalah utama dari penyelenggaraan program.

3. Dilanjutkan terhadap indikator input-proses untuk identifikasi elemen-elemen dalam sistem yang menyebabkan permasalahan output.

4. Dianjurkan konfirmasi nilai capaian output dengan hasil pengukuran yang dilakukan dalam Susenas atau SDKI untuk indikator yang sama, terutama bila capaian output terlalu tinggi (bahkan melebihi target).

5. Selain konfirmasi dengan hasil pengukuran dari sumber lain, jika capaian output terlalu tinggi/melebihi target, pemeriksaan kualitas data untuk variabel terkait harus dilakukan.

6. Perlu mempertimbangkan hal-hal antara lain: 1) Perbandingan antara pencapaian dengan target; 2) Kecenderungan pencapaian tahun sebelumnya dengan tahun berjalan; 3) Perbandingan antar wilayah; dan 4) Perbandingan dengan faktor-faktor terkait lainnya.

E. RUMUSAN MASALAH DAN TINDAK LANJUT

Setelah dilakukan analisis sederhana data indikator program dan anggaran KKBPK, maka permasalahan dapat diindentifikasi dan kemungkinan penyebabnya perlu dirumuskan. Berikut disajikan matriks tentang rumusan permasalahan dan rencana tindak lanjut :

NO	PERMASALAHAN TERIDENTIFIKASI	KEMUNGKINAN PENYEBAB MASALAH	RENCANA TINDAK LANJUT	KOMPONEN TERKAIT
1.				
2.				
dst	dst	dst	dst	dst

Pada kolom permasalahan teridentifikasi, permasalahan yang dimunculkan berbasiskan data yang dipresentasikan. Kemudian dipertimbangkan kemungkinan penyebab masalah. Setelah itu, dilakukan perencanaan menyelesaikan masalah tersebut di rencana tindak lanjut dan menentukan komponen yang terkait di kolom komponen terkait.

F. MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Radalgram KKBPK dimulai setelah rapat tersebut selesai dilaksanakan dan sesuai dengan rencana tindak lanjut yang telah disepakati.

1. Tujuan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Radalgram KKBPK:

   a. Untuk mengetahui lebih mendalam mengenai permasalahan yang telah teridentifikasi

   b. Untuk mengetahui penyebab pasti permasalahan yang telah teridentifikasi

   c. Untuk memastikan bahwa rencana tindak lanjut dilaksanakan

   d. Untuk mengawal dan memastikan komponen yang terkait dengan permasalahan melakukan tindak lanjut penyelesaian masalah sesuai kesepakatan

   e. Untuk mengawal dan memastikan wilayah yang terkait dengan permasalahan melakukan tindak lanjut penyelesaian masalah sesuai kesepakatan

2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Radalgram KKBPK dilakukan oleh pejabat berwenang dari tingkat atas ke tingkat di bawahnya, yaitu:

   a. Tingkat pusat ke komponen terkait permasalahan dan provinsi dan kabupaten dan kota
      Pengamatan dilakukan oleh BKKBN Pusat

   b. Tingkat provinsi ke komponen terkait permasalahan dan kabupaten dan kota
      Pengamatan dilakukan oleh Perwakilan BKKBN Provinsi

c. Tingkat kabupaten dan kota ke komponen terkait permasalahan dan kecamatan
   Pengamatan dilakukan oleh SKPD-KB Kabupaten dan Kota

3. Cara monitoring dan evaluasi pelaksanaan Radalgram KKBPK dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

   a. Ditentukan terlebih dahulu wilayah yang akan dikunjungi sesuai dengan permasalahan yang telah teridentifikasi

   b. Setelah itu dilakukan kunjungan ke wilayah yang akan dikunjungi sesuai dengan permasalahan yang telah teridentifikasi

   c. Pada wilayah dimaksud dilakukan wawancara mengenai penyebab permasalahan dan tindak lanjut yang telah dilakukan

   d. Jika penyebab masalah belum diketahui dan belum dilakukan tindak lanjut, maka hal ini akan disampaikan kembali pada Radalgram KKBPK selanjutnya untuk diberikan penyelesaian masalah

4. Substansi monitoring dan evaluasi, antara lain:
   a. Keterkaitan pengumpulan dan pengolahan dengan penyajian dan kualitas data

   b. Proses persiapan Radalgram KKBPK:
      1) Pemberian bahan presentasi kepada komponen lain sebelum dipresentasikan
      2) Masukan dan rencana tindak lanjut dari komponen lainnya

   c. Pelaksanaan Radalgram KKBPK:
      1) Kehadiran peserta terutama para pemangku pengambil keputusan
      2) Keterlibatan seluruh komponen dalam pelaksanaan radalgram
      3) Masukan dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan

BAB IV
P E N U T U P

Pedoman Radalgram KKBPK ini merupakan pedoman umum bagi pengelola data di tingkat Pusat hingga kabupaten dan kota dalam rangka Radalgram KKBPK. Selain itu, memberikan interprestasi secara tepat guna sehingga menjadi informasi yang bermanfaat bagi pengelola program maupun pemangku kepentingan terkait.

Kegiatan Radalgram KKBPK ini merupakan upaya untuk memonitor pelaksanaan Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga, menjadi bukti nyata, dan sekaligus sebagai akuntabilitas publik dari para pelaksana dan pengelola Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu, semangat dan komitmen dari para pengelola data di berbagai tingkatan wilayah sangat diperlukan untuk menunjang tersedianya analisis dan evaluasi Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga secara berkelanjutan.

Agar pelaksanaan kegiatan Radalgram KKBPK ini dapat berjalan sesuai yang diharapkan, maka semua pengelola Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga diharapkan untuk memberikan perhatian dan melaksanakan kegiatan ini sesuai dengan pedoman sebagaimana tertuang dalam buku ini. Menyadari keterbatasan dalam penyusunan buku pedoman ini, maka diperlukan suatu penyesuaian dengan situasi dan kondisi di lapangan.

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

Nomor : 445 /PER/G4/2016

TENTANG

PEDOMAN
RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM DAN ANGGARAN KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA

LAMPIRAN

1) CONTOH PENGHITUNGAN DATA **INDIKATOR DATA DAN INFORMASI PROGRAM KKBPK, INDIKATOR REALISASI ANGGARAN KKBPK DAN STOK ALAT KONTRASEPSI**

2) CONTOH **PENYAJIAN RADALGRAM KKBPK**

3) CONTOH **ANALISIS SEDERHANA DATA DAN INFORMASI PROGRAM DAN ANGGARAN KKBPK**

4) CONTOH **RUMUSAN MASALAH DAN TINDAK LANJUT**

LAMPIRAN 1

CONTOH PENGHITUNGAN DATA **INDIKATOR DATA DAN INFORMASI PROGRAM KKBPK DAN INDIKATOR REALISASI ANGGARAN KKBPK DAN STOK ALAT KONTRASEPSI**

1. INDIKATOR DATA DAN INFORMASI PROGRAM KKBPK

INDIKATOR INPUT

a. Cakupan Laporan Tempat Pelayanan KB

Wilayah X pada bulan September 2016 mempunyai 2.067 Tempat Pelayanan KB yang terdiri dari 432 Faskes KB Pemerintah, 105 Faskes KB Swasta, 412 Prakter Dokter, 1.114 Praktek Bidan dan 4 Jejaring Lainnya. Namun tidak semua Tempat Pelayanan KB tersebut melapor, terdapat 431 Faskes KB Pemerintah, 104 Faskes KB Swasta, 408 Prakter Dokter, 1.075 Praktek Bidan dan 4 Jejaring Lainnya yang melapor, maka cakupan laporannya adalah :

$$\frac{\text{Jumlah Tempat Pelayanan KB Lapor}}{\text{Jumlah Tempat Pelayanan KB Ada}} \times 100\%$$

Cakupan Laporan Faskes KB Pemerintah = $\frac{431}{432} \times 100\% = 99{,}8\%$

Cakupan Laporan Faskes KB Swasta = $\frac{104}{105} \times 100\% = 99{,}1\%$

Cakupan Laporan Praktek Dokter = $\frac{408}{412} \times 100\% = 99{,}0\%$

Cakupan Laporan Praktek Bidan = $\frac{1.075}{1.114} \times 100\% = 96{,}5\%$

Cakupan Laporan Jejaring Lainnya = $\frac{4}{4} \times 100\% = 100{,}0\%$

b. Cakupan Laporan Data Wilayah dan Institusi KB di Lapangan

Pada bulan September 2016, di Wilayah X terdapat 27 kabupaten dan kota, 626 kecamatan dan 5.958 desa/kelurahan. Sedangkan yang melapor untuk kabupaten dan kota seluruhnya, 625 kecamatan dan 5.941 desa/kelurahan. Jika dilihat dari Institusi KB di Lapangan, terdapat 631 PPLKB, 3.861 PLKB/PKB/Petugas KB Desa/Kelurahan, 7.684 PPKBD, 60.110 Sub PPKBD dan 186.071 Kelompok KB. Namun yang melapor hanya 374 PPLKB, 3.753 PLKB/PKB/Petugas KB Desa/Kelurahan, 7.656 PPKBD, 59.862 Sub PPKBD

dan 183.870 Kelompok KB. Maka cakupan laporannya adalah :

$$\frac{\text{Jumlah Data Wilayah dan Institusi KB di Lapangan yang Lapor}}{\text{Jumlah Data Wilayah dan Institusi KB di Lapangan yang Ada}} \times 100\%$$

Cakupan Laporan Kabupaten dan kota = $\frac{27}{27}$ x 100% = 100,0%

Cakupan Laporan Kecamatan = $\frac{625}{626}$ x 100% = 99,8%

Cakupan Laporan Desa/kelurahan = $\frac{5.941}{5.958}$ x 100% = 99,7%

Cakupan Laporan PPLKB = $\frac{374}{631}$ x 100% = 59,3%

Cakupan Laporan PLKB/PKB/Petugas KB Desa/Kel = $\frac{3.753}{3.861}$ x 100%

= 97,2%

Cakupan Laporan PPKBD = $\frac{7.656}{7.684}$ x 100% = 99,6%

Cakupan Laporan Sub PPKBD = $\frac{59.862}{60.110}$ x 100% = 99,6%

Cakupan Laporan Kelompok KB = $\frac{183.870}{186.071}$ x 100% = 98,8%

c. Frekuensi Operasional Mupen

Frekuensi Operasional Mupen di Wilayah X pada bulan September 2016 sebanyak 3 kali untuk Operasional Mupen Provinsi dan 4 kali untuk Operasional Mupen Kabupaten dan kota, padahal di Wilayah X terdapat 5 kabupaten dan kota dan 78 kecamatan. Sehingga frekuensi operasional Mupennya adalah :

$$\frac{\text{Frekuensi Operasional Mupen}}{\text{Jumlah Wilayah}} \times 100\%$$

Frekuensi Operasional Mupen Provinsi = $\frac{3}{5}$ x 100% = 60,0%

Frekuensi Operasional Mupen Kabupaten dan kota = $\frac{4}{78}$ x 100% = 5,1%

d. Sumber Daya Manusia

Pada bulan September 2016, Wilayah X memiliki 116 PPLKB di 155 kecamatan dan 350 PLKB/PKB/Petugas KB Desa/kelurahan di 1.551 desa/kelurahan. Maka persentase sumber daya manusia yang ada adalah :

$$\frac{\text{Jumlah Sumber Daya Manusia}}{\text{Jumlah Wilayah Binaan}} \text{ x } 100\%$$

Persentase PPLKB = $\frac{116}{155}$ x 100% = 74,8%

Persentase PLKB/PKB/Petugas KB Desa/kelurahan = $\frac{350}{1.551}$ x 100%

= 22,6%

e. Jumlah Persediaan Alat Kontrasepsi Program di Semua Faskes KB

Wilayah X pada akhir bulan September 2016 mempunyai alat kontrasepsi sebanyak 41.298 IUD, 115.121 Kondom, 31.323 Implant, 242.479 Suntik dan 282.087 Pil. Pemakaian rata-rata per bulan di Wilayah X adalah 7.834 untuk IUD, 13.023 untuk Kondom, 13.668 untuk Implant, 811.910 untuk Suntik dan 857.631 untuk Pil. Maka ketersediaan alat kontrasepsi di Wilayah X adalah :

$$\frac{\text{Jumlah Persediaan Alkon di Semua Faskes KB}}{\text{Pemakaian Rata-rata per Bulan}} \text{ x } 100\%$$

Ketersediaan IUD = $\frac{41.298}{7.834}$ = 5,3 bulan

Ketersediaan Kondom = $\frac{115.121}{13.023}$ = 8,8 bulan

Ketersediaan Implant = $\frac{31.323}{13.668}$ = 2,3 bulan

Ketersediaan Suntik = $\frac{242.479}{811.910}$ = 0,3 bulan

Ketersediaan Pil $= \frac{282.087}{857.631} = 0{,}3$ bulan

INDIKATOR PROSES

a. Pembinaan Kelompok Kegiatan (BKB, BKR, BKL)

Di bulan September 2016 tercatat di Wilayah X memiliki total 5.555 keluarga yang ikut kelompok BKB, namun hanya 4.366 keluarga yang mengikuti pertemuan kelompok BKB. Untuk kelompok BKR, terdapat 1.590 keluarga yang ikut kelompok BKR, namun hanya 1.167 keluarga yang mengikuti pertemuan kelompok BKR. Begitu juga dengan BKL, terdapat 1.245 keluarga yang ikut kelompok BKL, namun hanya 1.010 keluarga yang mengikuti pertemuan kelompok BKL. Maka persentase kehadiran anggota kelompok dalam pertemuan adalah :

$$\frac{\text{Jumlah Keluarga Anggota Kelompok Kegiatan Hadir dalam Pertemuan}}{\text{Jumlah Keluarga Anggota Kelompok Kegiatan}} \; x\; 100$$

% Kehadiran Anggota BKB= $\frac{4.366}{5.555}$ x 100% = 78,6%

% Kehadiran Anggota BKR = $\frac{1.167}{1.590}$ x 100% = 73,4%

% Kehadiran Anggota BKL = $\frac{1.010}{1.245}$ x 100% = 81,1%

b. Frekuensi Operasional Penyuluhan dan KIE KB

Penyuluhan KB oleh PLKB/PKB/Petugas KB Desa/Kelurahan di Wilayah X pada bulan September 2016 dilakukan sebanyak 976 kali di 1.669 desa/kelurahan. Selain itu, KIE juga dilakukan oleh Toma/Toga/Toda. Dari 1.727 Toma/Toga/Toda yang ada, hanya 609 yang aktif melakukan KIE. Maka persentase penyuluhan yang dilakukan adalah :

$$\frac{\text{Frekuensi Penyuluhan KB oleh Tenaga Penyuluh}}{\text{Jumlah Desa/Kelurahan}}$$

Frekuensi Penyuluhan KB oleh PLKB/PKB/Petugas KB Desa/Kelurahan = $\frac{976}{1.669}$ x 100% = 58,5%

Persentase Toma/Toga/Toda aktif melakukan KIE = $\frac{609}{1.727}$ x 100% = 35,3%

c. Status PUS Anggota Kelompok Kegiatan (BKB, BKR, BKL, UPPKS)

Pada bulan September 2016, jumlah anggota kelompok BKB di Wilayah X sebesar 6.893 keluarga dan 6.047 keluarga diantaranya berstatus PUS. Untuk kelompok BKR beranggotakan 1.953 keluarga dan 1.512 diantaranya berstatus PUS. Sedangkan kelompok BKL beranggotakan 2.781 keluarga dan 1.353 diantaranya berstatus PUS. Untuk kelompok UPPKS beranggotakan 1.346 keluarga dan 969 diantaranya berstatus PUS. Maka persentase PUS anggota kelompok kegiatan adalah :

$$\frac{\text{Jumlah Anggota Kelompok Kegiatan berstatus PUS}}{\text{Jumlah Anggota Kelompok Kegiatan}} \times 100\%$$

$$\% \text{ PUS Anggota Kelompok BKB} = \frac{6.047}{6.893} \text{ x } 100\% = 87{,}7\%$$

$$\% \text{ PUS Anggota Kelompok BKR} = \frac{1.512}{1.953} \text{ x } 100\% = 77{,}4\%$$

$$\% \text{ PUS Anggota Kelompok BKL} = \frac{1.353}{2.781} \text{ x } 100\% = 48{,}7\%$$

$$\% \text{ PUS Anggota Kelompok UPPKS} = \frac{969}{1.346} \text{ x } 100\% = 72{,}0\%$$

INDIKATOR OUTPUT

a. Hasil Pelayanan Peserta KB Baru menggunakan Informed Consent

Pencapaian PB menggunakan Informed Consent di Wilayah X pada bulan September 2016 untuk 5 metode kontrasepsi yaitu 3.538 untuk IUD, 1.343 untuk MOW, 9 untuk MOP, 3.075 untuk Implant, dan 27.855 untuk Suntik. Sedangkan pencapaian PB untuk masing-masing metode kontrasepsi tersebut adalah 4.227 untuk IUD, 1.530 untuk MOW, 10 untuk MOP, 4.287 untuk Implant, dan 47.756 untuk Suntik. Maka persentase PB yang yang menggunakan informed consent adalah :

$$\frac{\text{Jumlah Peserta KB Baru (PB) menurut Metode Kontrasepsi Menggunakan Informed Consent}}{\text{Jumlah PB Menurut Metode Kontrasepsi}} \times 100\%$$

$$\% \text{ PB } \textit{Informed Consent} \text{ IUD} = \frac{3.538}{4.227} \text{ x } 100\% = 83{,}7\%$$

$$\% \text{ PB } \textit{Informed Consent} \text{ MOW} = \frac{1.343}{1.530} \text{ x } 100\% = 87{,}8\%$$

% PB *Informed Consent* MOP = $\frac{9}{10}$ x 100% = 90,0%

% PB *Informed Consent* Implant = $\frac{3.075}{4.287}$ x 100% = 71,7%

% PB *Informed Consent* Suntik = $\frac{27.855}{47.756}$ x 100% = 58,3%

b. Hasil Pelayanan Peserta KB Baru menurut Metode Kontrasepsi

Sampai dengan bulan September 2016, pencapaian PB di Wilayah X sebesar 6.303 dengan rincian masing-masing alat kontrasepsi 1.413 untuk IUD, 244 untuk MOW, 243 untuk Implant, 3.802 untuk Suntik, 472 untuk Pil, 8 untuk MOP dan 121 untuk Kondom. Maka persentase masing-masing alat kontrasepsi tehadap pencapaian PB Total adalah :

$$\frac{\text{Jumlah Peserta KB Baru (PB) menurut Metode Kontrasepsi}}{\text{Jumlah PB Total}} \times 100\%$$

% PB IUD terhadap PB Total = $\frac{1.413}{6.303}$ x 100% = 22,4%

% PB MOW terhadap PB Total = $\frac{244}{6.303}$ x 100% = 3,9%

% PB Implant terhadap PB Total = $\frac{243}{6.303}$ x 100% = 3,9%

% PB Suntik terhadap PB Total = $\frac{3.802}{6.303}$ x 100% = 60,3%

% PB Pil terhadap PB Total = $\frac{472}{6.303}$ x 100% = 7,5%

% PB MOP terhadap PB Total = $\frac{8}{6.303}$ x 100% = 0,1%

% PB Kondom terhadap PB Total = $\frac{121}{6.303}$ x 100% = 1,9%

Sedangkan untuk persentase PB Wanita, PB Pria dan PB MKJP adalah :

% PB Wanita terhadap PB Total =

$$\frac{1.413+244+243+3.802+472}{6.303} \times 100\% = 98,0\%$$

$$\% \text{ PB Pria terhadap PB Total} = \frac{8+121}{6.303} \times 100\% = 2,0\%$$

$$\% \text{ PB MKJP terhadap PB Total} = \frac{1.413+244+243+8}{6.303} \times 100\% = 30,3\%$$

c. Hasil Pelayanan Peserta KB Baru terhadap Target

Sampai dengan bulan September 2016, pencapaian PB di Wilayah X sebesar 102.351 dengan rincian masing-masing alat kontrasepsi 7.369 untuk IUD, 2.369 untuk MOW, 13.741 untuk Implant, 50.724 untuk Suntik, 21.115 untuk Pil, 624 untuk MOP dan 6.409 untuk Kondom. Sedangkan untuk Perkiraan Permintaan Masyarakat (PPM) adalah 153.090 dengan rincian 7.800 untuk IUD, 2.550 untuk MOW, 19.170 untuk Implant, 87.120 untuk Suntik, 31.160 untuk Pil, 710 untuk MOP dan 4.580 untuk Kondom. Maka persentase masing-masing alat kontrasepsi tehadap PPM adalah :

$$\frac{\text{Jumlah Peserta KB Baru (PB)}}{\text{Jumlah Target PB}} \times 100\%$$

$$\% \text{ PB IUD terhadap PPM PB IUD} = \frac{7.369}{7.800} \times 100\% = 94,5\%$$

$$\% \text{ PB MOW terhadap PPM PB MOW} = \frac{2.369}{2.550} \times 100\% = 92,9\%$$

$$\% \text{ PB Implant terhadap PPM PB Implant} = \frac{13.741}{19.170} \times 100\% = 71,7\%$$

$$\% \text{ PB Suntik terhadap PPM PB Suntik} = \frac{50.724}{87.120} \times 100\% = 58,2\%$$

$$\% \text{ PB Pil terhadap PPM PB Pil} = \frac{21.115}{31.160} \times 100\% = 67,8\%$$

$$\% \text{ PB MOP terhadap PPM PB MOP} = \frac{624}{710} \times 100\% = 87,9\%$$

% PB Kondom terhadap PPM PB Kondom = $\frac{6.409}{4.580}$ x 100% = 139,9%

Sedangkan untuk persentase PB Wanita, PB Pria, PB MKJP dan PB Total adalah :

% PB Wanita terhadap PPM PB Wanita =
$\frac{7.369+2.369+13.741+50.724+21.115}{147.800}$ x 100% = 64,5%

% PB Pria terhadap PPM PB Pria = $\frac{624+6.409}{5.290}$ x 100% = 132,9%

% PB MKJP terhadap PPM PB MKJP =
$\frac{7.369+2.369+13.741+624}{30.230}$ x 100% = 79,7%

% PB Total terhadap PPM PB Total = $\frac{102.351}{153.090}$ x 100% = 66,9%

d. Hasil Pelayanan Peserta KB Aktif menurut Metode Kontrasepsi

Pada bulan September 2016, pencapaian PA di Wilayah X sebesar 26.227 dengan rincian masing-masing alat kontrasepsi 403 untuk IUD, 197 untuk MOW, 1.064 untuk Implant, 14.969 untuk Suntik, 7.751 untuk Pil, 1 untuk MOP dan 1.842 untuk Kondom. Maka persentase masing-masing alat kontrasepsi tehadap pencapaian PA Total adalah :

$$\frac{\text{Jumlah Peserta KB Aktif (PA) menurut Metode Kontrasepsi}}{\text{Jumlah PA Total}} \times 100\%$$

% PA IUD terhadap PA Total = $\frac{403}{26.227}$ x 100% = 1,5%

% PA MOW terhadap PA Total = $\frac{197}{26.227}$ x 100% = 0,8%

% PA Implant terhadap PA Total = $\frac{1.064}{26.227}$ x 100% = 4,1%

% PA Suntik terhadap PA Total = $\frac{14.969}{26.227}$ x 100% = 57,1%

% PA Pil terhadap PA Total = $\frac{7.751}{26.227}$ x 100% = 29,6%

$$\% \text{ PA MOP terhadap PA Total} = \frac{1}{26.227} \times 100\% = 0{,}0\%$$

$$\% \text{ PA Kondom terhadap PA Total} = \frac{1.842}{26.227} \times 100\% = 7{,}0\%$$

Sedangkan untuk persentase PA Wanita, PA Pria dan PA MKJP adalah :

$$\% \text{ PA Wanita terhadap PA Total} = \frac{403+197+1.064+14.969+7.751}{26.227} \times 100\% = 93{,}0\%$$

$$\% \text{ PA Pria terhadap PA Total} = \frac{1+1.842}{26.227} \times 100\% = 7{,}0\%$$

$$\% \text{ PA MKJP terhadap PA Total} = \frac{403+197+1+1.064}{26.227} \times 100\% = 6{,}3\%$$

e. Hasil Pelayanan Peserta KB Aktif terhadap Target

Pada bulan September 2016, pencapaian PA di Wilayah X sebesar 1.174.525 dengan rincian masing-masing alat kontrasepsi 159.998 untuk IUD, 17.713 untuk MOW, 216.872 untuk Implant, 400.098 untuk Suntik, 333.726 untuk Pil, 12.799 untuk MOP dan 33.319 untuk Kondom. Sedangkan untuk Perkiraan Permintaan Masyarakat (PPM) adalah 1.191.140 dengan rincian 84.330 untuk IUD, 19.930 untuk MOW, 177.990 untuk Implant, 559.810 untuk Suntik, 305.550 untuk Pil, 10.090 untuk MOP dan 33.440 untuk Kondom. Maka persentase masing-masing alat kontrasepsi tehadap PPM adalah :

$$\frac{\text{Jumlah Peserta KB Aktif (PA)}}{\text{Jumlah Target PA}} \times 100\%$$

$$\% \text{ PA IUD terhadap PPM PA IUD} = \frac{159.998}{84.330} \times 100\% = 189{,}7\%$$

$$\% \text{ PA MOW terhadap PPM PA MOW} = \frac{17.713}{19.930} \times 100\% = 88{,}9\%$$

$$\% \text{ PA Implant terhadap PPM PA Implant} = \frac{216.872}{177.990} \times 100\% = 121{,}8\%$$

$$\% \text{ PA Suntik terhadap PPM PA Suntik} = \frac{400.098}{559.810} \times 100\% = 71{,}5\%$$

$$\% \text{ PA Pil terhadap PPM PA Pil} = \frac{333.726}{305.550} \times 100\% = 109,2\%$$

$$\% \text{ PA MOP terhadap PPM PA MOP} = \frac{12.799}{10.090} \times 100\% = 126,8\%$$

$$\% \text{ PA Kondom terhadap PPM PA Kondom} = \frac{33.319}{33.440} \times 100\% = 99,6\%$$

Sedangkan untuk persentase PB Wanita, PB Pria, PB MKJP dan PB Total adalah :

$$\% \text{ PA Wanita terhadap PPM PA Wanita} = \frac{159.998+17.713+216.872+400.098+333.726}{1.147.610} \times 100\% = 98,3\%$$

$$\% \text{ PA Pria terhadap PPM PA Pria} = \frac{12.799+33.319}{43.530} \times 100\% = 105,9\%$$

$$\% \text{ PA MKJP terhadap PPM PA MKJP} = \frac{159.998+17.713+12.799+216.872}{292.340} \times 100\% = 139,4\%$$

$$\% \text{ PA Total terhadap PPM PA Total} = \frac{1.174.525}{1.191.140} \times 100\% = 98,6\%$$

f. Kasus Komplikasi Berat dan Kegagalan menurut Metode Kontrasepsi

Kasus komplikasi berat di Wilayah X pada bulan September 2016 sebesar 80 kasus dengan rincian, 8 kasus IUD, 15 kasus MOW, 2 kasus MOP, 55 kasus Implant. Sedangkan kasus kegagalan sebesar 105 kasus dengan rincian 39 kasus IUD, 30 kasus MOW, 7 kasus MOP, 29 kasus Implant. Maka persentase kasus komplikasi berat dan kegagalan menurut *population at risk*nya adalah :

Population at risk untuk kasus komplikasi :

1. PB MOP s.d. Desember tahun sebelumnya (Tahun 2015)
2. PA Implant tahun sebelumnya (Tahun 2015)
3. PB IUD s.d. Desember 3 tahun sebelumnya (Tahun 2013, 2014, 2015)
4. PB MOW s.d. Desember tahun sebelumnya (Tahun 2015)

Population at risk untuk kasus kegagalan :

1. PA MOP tahun sebelumnya (Tahun 2015)
2. PA Implant tahun sebelumnya (Tahun 2015)
3. PA IUD tahun sebelumnya (Tahun 2015)

4. PA MOW tahun sebelumnya (Tahun 2015)

$$\frac{\text{Jumlah Komplikasi Berat/Kegagalan menurut Metode Kontrasepsi}}{\text{Pop at Risk menurut Metode Kontrasepsi}} \times 100\%$$

% Komplikasi Berat IUD terhadap Pop at Risk = $\frac{8}{249.777}$ x 100%

= 0,003%

% Komplikasi Berat MOW terhadap Pop at Risk = $\frac{15}{15.812}$ x 100%

= 0,095%

% Komplikasi Berat MOP terhadap Pop at Risk = $\frac{2}{948}$ x 100%

= 0,211%

% Komplikasi Berat Implant terhadap Pop at Risk = $\frac{55}{243.857}$ x 100%

= 0,023%

% Kegagalan IUD terhadap Pop at Risk = $\frac{39}{290.984}$ x 100% = 0,013%

% Kegagalan MOW terhadap Pop at Risk = $\frac{30}{149.826}$ x 100% = 0,020%

% Kegagalan MOP terhadap Pop at Risk = $\frac{7}{29.176}$ x 100% = 0,024%

% Kegagalan Implant terhadap Pop at Risk = $\frac{29}{243.857}$ x 100%

= 0,012%

g. Prevalensi Penggunaan Kontrasepsi (CPR)

Jumlah PUS di Wilayah X pada bulan September 2016 adalah 26.943 PUS. Sedangkan jumlah Peserta KB Aktif yang ada sebesar 20.100 PA. Maka kesertaan ber-KB di Wilayah X adalah :

$$\frac{\text{Jumlah Peserta KB Aktif (PA)}}{\text{Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)}} \times 100\%$$

$$\text{CPR} = \frac{20.100}{26.943} \text{ x } 100\% = 74{,}6\%$$

h. Kebutuhan KB Tidak Terpenuhi (PUS Bukan Peserta KB Alasan Ingin Tunda dan Tidak Ingin Anak Lagi)

Pada bulan September 2016, jumlah PUS di Wilayah X adalah 205.690 PUS. Sedangkan PUS tidak ber-KB dengan alasan Ingin Anak Ditunda dan Tidak Ingin Anak Lagi sebesar 15.459 dan 12.293. Maka *PUS Bukan Peserta KB Alasan Ingin Tunda dan Tidak Ingin Anak Lagi* di Wilayah X adalah :

$$\frac{\text{Jumlah PUS Bukan Peserta KB Alasan Ingin Anak Tunda + PUS Bukan Peserta KB Alasan Tidak Ingin Anak Lagi}}{\text{Jumlah PUS}} \times 100\%$$

PUS Bukan Peserta KB Alasan Ingin Anak Tunda dan Tidak Ingin Anak Lagi

$$= \frac{15.459+12.293}{205.690} \text{ x } 100\% = 13{,}5\%$$

i. Kesertaan ber-KB Anggota Kelompok Kegiatan (BKB, BKR, BKL, UPPKS)

Pada bulan September 2016, jumlah anggota kelompok BKB berstatus PUS di Wilayah X sebesar 5.918 PUS dan 4.362 PUS diantaranya berstatus ber-KB. Untuk kelompok BKR beranggotakan 5.355 PUS dan 3.868 diantaranya ber-KB. Sedangkan kelompok BKL beranggotakan 3.938 PUS dan 2.669 diantaranya ber-KB. Untuk kelompok UPPKS beranggotakan 1.128 PUS dan 985 diantaranya ber-KB. Maka persentase PUS anggota kelompok kegiatan adalah :

$$\frac{\text{Jumlah PUS Anggota Kelompok Kegiatan yang ber-KB}}{\text{Jumlah PUS Anggota Kelompok Kegiatan}} \times 100\%$$

$$\text{\% PUS Anggota Kelompok BKB ber-KB} = \frac{4.362}{5.918} \text{ x } 100\% = 73{,}7\%$$

$$\% \text{ PUS Anggota Kelompok BKR ber-KB} = \frac{3.868}{5.355} \times 100\% = 72{,}2\%$$

$$\% \text{ PUS Anggota Kelompok BKL ber-KB} = \frac{2.669}{3.938} \times 100\% = 67{,}8\%$$

$$\% \text{ PUS Anggota Kelompok UPPKS ber-KB} = \frac{985}{1.128} \times 100\% = 87{,}3\%$$

2. INDIKATOR REALISASI ANGGARAN KKBPK DAN STOK ALAT KONTRASEPSI

BELANJA TOTAL

Sampai dengan bulan September 2016, di Wilayah X realisasi belanja total yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal sebesar Rp. 88.891.927.987. Sedangkan pagu anggaran di Wilayah X sebesar Rp. 182.877.159.000. Maka realisasi anggaran total adalah :

$$\frac{\text{Realisasi Belanja Total}}{\text{Pagu Anggaran Belanja Total}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi Anggaran} = \frac{88.891.927.987}{182.877.159.000} \times 100\% = 48{,}6\%$$

BELANJA PEGAWAI

a. Realisasi Belanja Pegawai berdasarkan Pagu Belanja Pegawai

Realisasi belanja pegawai Wilayah X sampai September 2016 adalah Rp. 64.011.395.958. Sedangkan pagu anggaran untuk belanja pegawai adalah Rp. 95.515.415.000. Maka persentase realisasi belanja pegawai per pagu belanja pegawai adalah :

$$\frac{\text{Realisasi Belanja Pegawai}}{\text{Pagu Anggaran Belanja Pegawai}} \times 100\%$$

Realisasi Belanja Pegawai per Pagu Belanja Pegawai adalah

$$= \frac{64.011.395.958}{95.515.415.000} \times 100\% = 67{,}0\%$$

b. Realisasi Belanja Pegawai berdasarkan Pagu Belanja Total

Realisasi belanja pegawai Wilayah X sampai September 2016 adalah Rp. 64.011.395.958. Sedangkan pagu anggaran total adalah Rp. 1.703.001.909.000. Maka persentase realisasi belanja pegawai per pagu total adalah :

$$\frac{\text{Realisasi Belanja Pegawai}}{\text{Pagu Anggaran Belanja Total}} \times 100\%$$

Realisasi Belanja Pegawai per Pagu Total adalah

$$= \frac{64.011.395.958}{1.703.001.909.000} \times 100\% = 3{,}8\%$$

BELANJA BARANG

a. Realisasi Belanja Barang berdasarkan Pagu Belanja Barang

Realisasi belanja barang Wilayah X sampai September 2016 adalah Rp. 165.955.695.494. Sedangkan pagu anggaran untuk belanja barang adalah Rp. 1.579.117.557.000. Maka persentase realisasi belanja barang per pagu belanja barang adalah :

$$\frac{\text{Realisasi Belanja Barang}}{\text{Pagu Anggaran Belanja Barang}} \times 100\%$$

Realisasi Belanja Pegawai per Pagu Belanja Pegawai adalah

$$= \frac{165.955.695.494}{1.579.117.557.000} \times 100\% = 10{,}5\%$$

b. Realisasi Belanja Barang berdasarkan Pagu Belanja Total

Realisasi belanja pegawai Wilayah X sampai September 2016 adalah Rp. 165.955.695.494. Sedangkan pagu anggaran total adalah Rp. 1.703.001.909.000. Maka persentase realisasi belanja pegawai per pagu total adalah :

$$\frac{\text{Realisasi Belanja Barang}}{\text{Pagu Anggaran Belanja Total}} \times 100\%$$

Realisasi Belanja Barang per Pagu Total adalah

$$= \frac{165.955.695.494}{1.703.001.909.000} \times 100\% = 9{,}7\%$$

BELANJA MODAL

a. Realisasi Belanja Modal berdasarkan Pagu Belanja Modal

Realisasi belanja modal Wilayah X sampai September 2016 adalah Rp. 1.989.465.421 Sedangkan pagu anggaran untuk belanja modal adalah Rp. 28.368.937.000. Maka persentase realisasi belanja modal per pagu belanja modal adalah :

$$\frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Pagu Anggaran Belanja Modal}} \times 100\%$$

Realisasi Belanja Modal per Pagu Belanja Modal adalah

$$= \frac{1.989.465.421}{28.368.937.000} \times 100\% = 7,0\%$$

b. Realisasi Belanja Modal berdasarkan Pagu Belanja Total

Realisasi belanja modal Wilayah X sampai September 2016 adalah Rp. 1.989.465.421. Sedangkan pagu anggaran total adalah Rp. 1.703.001.909.000. Maka persentase realisasi belanja pegawai per pagu total adalah :

$$\frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Pagu Anggaran Belanja Total}} \times 100\%$$

Realisasi Belanja modal per Pagu Total adalah

$$= \frac{1.989.465.421}{1.703.001.909.000} \times 100\% = 0,1\%$$

PERKIRAAN KEMAMPUAN PERSEDIAAN ALKON

Pada bulan September 2016, di Wilayah X, ketersediaan alat kontrasepsi di gudang provinsi dan gudang pusat untuk IUD sebesar 30.687 unit, Kondom sebesar 47.640 lusin, Implant sebesar 117.584 set, Suntik sebesar 5.551.737 vial dan Pil sebesar 517.230 strip. Sedangkan pemakaian rata-rata per bulan untuk IUD, Kondom, Implant, Suntik dan Pil secara berturut-turut adalah 7.384 unit, 13.023 lusin, 13.668 set, 811.910 vial dan 857.631 strip. Maka rasio persediaan untuk masing-masing alat kontrasepsi adalah :

$$\frac{\text{Jumlah Persediaan Alkon di Provinsi dan Kabupaten dan kota}}{\text{Pemakaian Rata-rata per Bulan}}$$

$$\text{Rasio ketersediaan IUD} = \frac{30.687}{7.348} = 4,2 \text{ bulan}$$

$$\text{Rasio ketersediaan Kondom} = \frac{47.640}{13.023} = 3,7 \text{ bulan}$$

$$\text{Rasio ketersediaan Implant} = \frac{117.584}{13.668} = 8,6 \text{ bulan}$$

$$\text{Rasio ketersediaan Suntik} = \frac{5.551.737}{811.910} = 6,8 \text{ bulan}$$

$$\text{Rasio ketersediaan Pil} = \frac{517.230}{857.631} = 0{,}6 \text{ bulan}$$

LAMPIRAN 2

CONTOH **PENYAJIAN RADALGRAM KKBPK**

1. INDIKATOR DATA DAN INFORMASI PROGRAM KKBPK

INDIKATOR INPUT

a. Cakupan Laporan Tempat Pelayanan KB

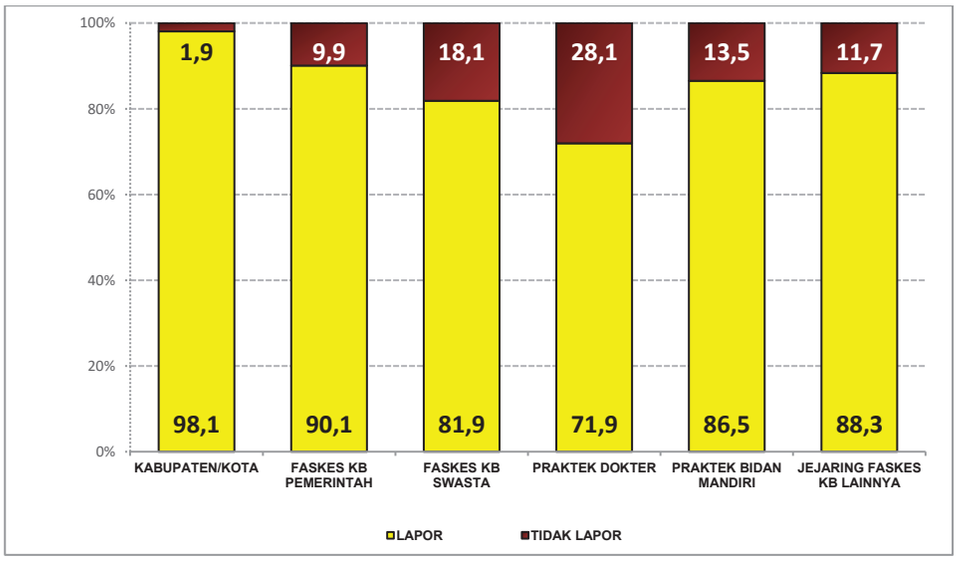

b. Cakupan Laporan Data Wilayah dan Institusi KB di Lapangan

CAKUPAN	ADA	LAPOR	%
KAB/KOTA	513	470	91,6
KECAMATAN	6.917	5.730	82,8
DESA/KELURAHAN	81.871	67.134	82,0
PPLKB	6.419	4.307	67,1
PLKB/PKB/PETUGAS KB DESA/KELURAHAN	30.927	24.363	78,8
PPKBD	81.020	70.758	87,3
SUB PPKBD	398.833	366.835	92,0
KELOMPOK KB	628.240	605.811	96,4

c. Frekuensi Operasional Mupen

OPERASIONAL MUPEN PROVINSI		
KAB/KOTA	FREKUENSI	%
5	3	60,0

OPERASIONAL MUPEN KAB/KOTA		
KECAMATAN	FREKUENSI	%
78	4	5,1

d. Sumber Daya Manusia

RASIO PPLKB TERHADAP KECAMATAN		
KECAMATAN	PPLKB	%
155	116	74,8

RASIO PLKB/PKB/PETUGAS KB DESA/KELURAHAN TERHADAP DESA/KELURAHAN		
DESA/KEL	PLKB/PKB/PETUGAS KB DESA/KEL	%
1551	350	22,6

e. Jumlah Persediaan Alat Kontrasepsi Program di Semua Faskes KB

ALAT KONTRASEPSI	JUMLAH PERSEDIAAN	RATA-RATA PEMAKAIAN PER BULAN	KETERSEDIAAN (BULAN)
1	*2*	*3*	*4=3/2*
IUD	41.298	7.834	5,3
KONDOM	115.121	13.023	8,8
IMPLANT	31.323	13.668	2,3
SUNTIK	242.479	811.910	0,3
PIL	282.027	857.631	0,3

INDIKATOR PROSES

a. Pembinaan Kelompok Kegiatan (BKB, BKR, BKL)

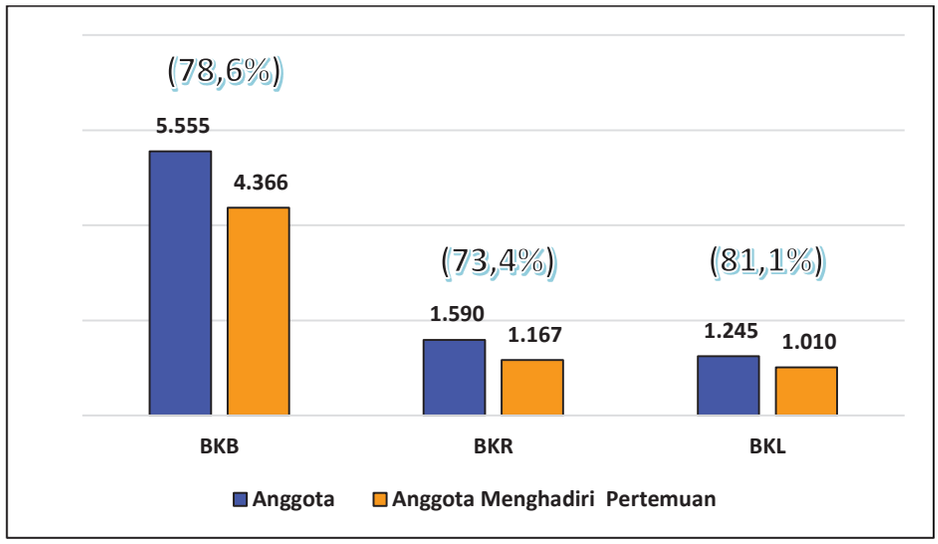

b. Frekuensi Operasional Penyuluhan dan KIE KB

PENYULUHAN OLEH PLKB/PKB/PETUGAS KB DESA/KELURAHAN		
DESA/KELURAHAN	PENYULUHAN	%
1.669	976	58,5

TOMA/TOGA/TODA AKTIF KIE		
TOMA/TOGA/TODA ADA	TOMA/TOGA/TODA AKTIF KIE	%
1.727	609	35,3

c. Status PUS Anggota Kelompok Kegiatan (BKB, BKR, BKL, UPPKS)

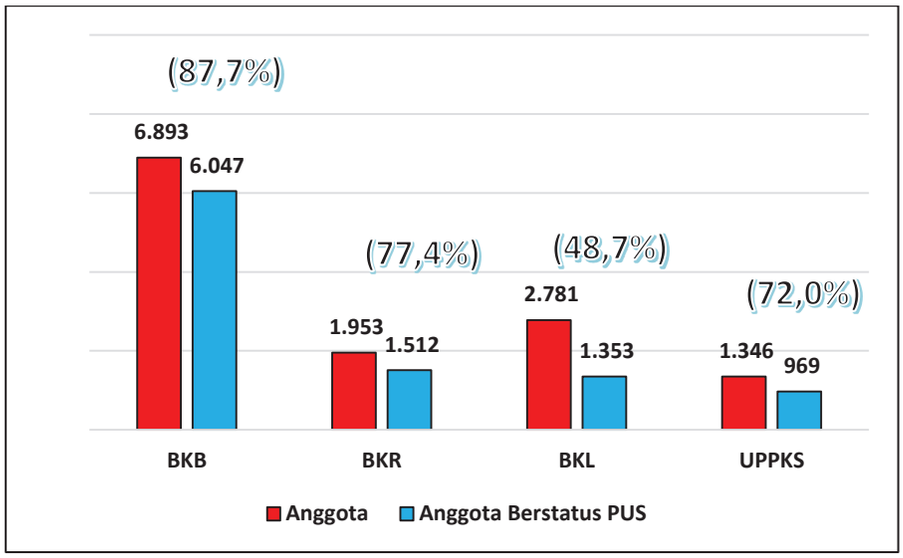

INDIKATOR OUTPUT

a. Hasil Pelayanan Peserta KB Baru menggunakan Informed Consent

ALKON	PB	PB INFORMED CONSENT	%
1	*2*	*3*	*4=3/2*
IUD	4.337	3.538	81,6
MOW	1.530	1.343	87,8
MOP	10	9	90,0
IMPLANT	4.287	3.075	71,7
SUNTIK	47.756	27.885	58,4

b. Hasil Pelayanan Peserta KB Baru menurut Metode Kontrasepsi

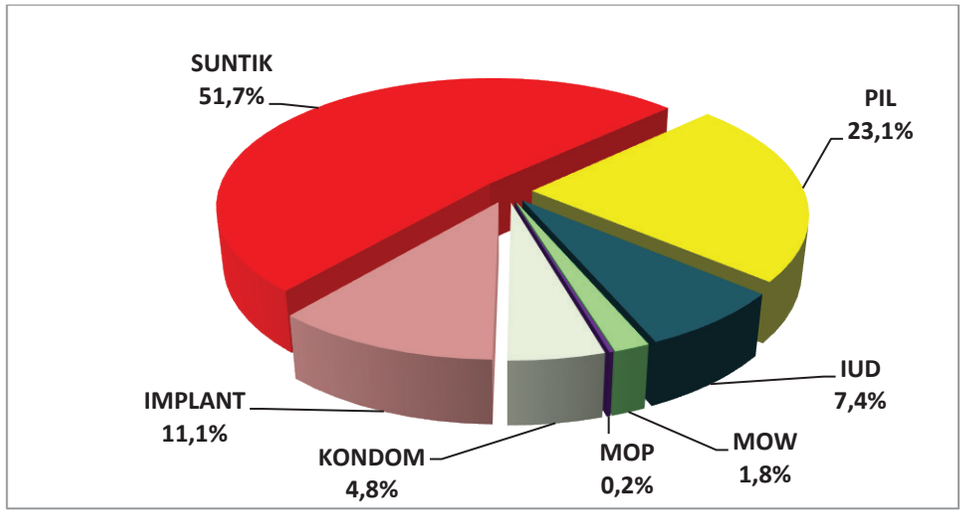

c. Hasil Pelayanan Peserta KB Baru terhadap Target

ALKON	PPM		PENCAPAIAN		PENC. S.d. SEPTEMBER 2015 THD PPM 2015
	JUMLAH	%MIX	JUMLAH	% THD PPM	
IUD	613.540	8,6	360.616	58,8	224,4
MOW	132.110	1,8	85.899	65,0	159,0
MOP	15.550	0,2	9.748	62,7	71,2
KONDOM	349.410	4,9	232.045	66,4	95,7
IMPLANT	1.026.790	14,4	540.680	52,7	161,7
SUNTIK	3.174.200	44,4	2.524.872	79,5	67,6
PIL	1.840.770	25,7	1.125.382	61,1	46,0
TOTAL	7.152.370	100,0	4.879.242	68,2	68,4
PRIA	364.960	5,1	241.793	66,3	94,8
WANITA	6.787.410	94,9	4.637.449	68,3	67,3
MKJP	1.787.990	25,0	996.943	55,8	178,3

d. Hasil Pelayanan Peserta KB Aktif menurut Metode Kontrasepsi

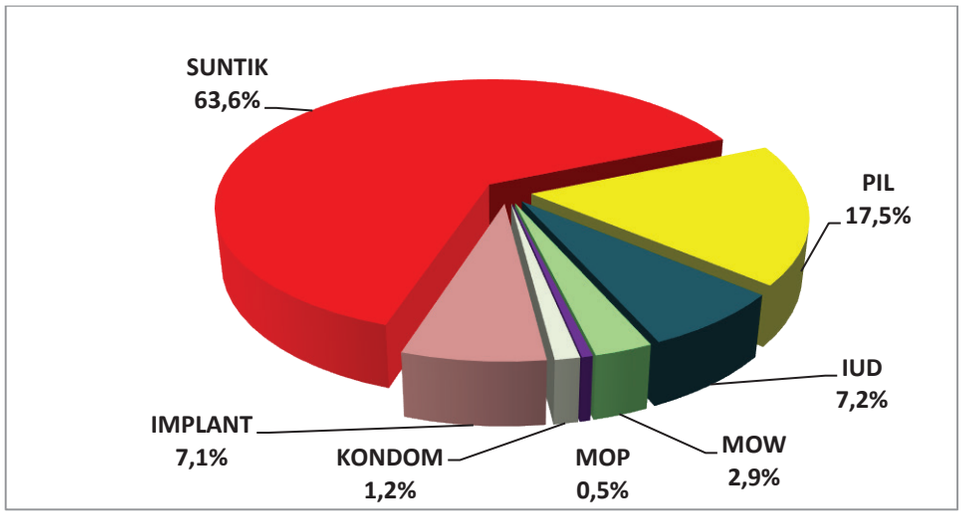

e. Hasil Pelayanan Peserta KB Aktif terhadap Target

ALKON	PPM	PENC.	% THD PPM
IUD	1.756.250	1.659.646	94,5
MOW	1.678.170	659.038	39,3
MOP	150.120	124.039	82,6
KONDOM	1.110.810	284.781	25,6
IMPLANT	2.776.900	1.623.576	58,5
SUNTIK	15.670.930	14.641.907	93,4
PIL	6.877.790	4.026.223	58,5
TOTAL	**30.020.970**	**23.019.210**	**76,7**
PRIA	**1.260.930**	**408.820**	**32,4**
WANITA	**28.760.040**	**22.610.390**	**78,6**
MKJP	**6.361.440**	**4.066.299**	**63,9**

f. Kasus Komplikasi Berat dan Kegagalan menurut Metode Kontrasepsi

KOMPLIKASI BERAT/ KEGAGALAN	IUD	MOW	MOP	IMPLANT
KOMPLIKASI BERAT				
POP AT RISK	1.650.444	104.930	10.516	1.616.479
KASUS	306	124	8	719
%	0,019	0,118	0,076	0,044
KEGAGALAN				
POP AT RISK	1.652.447	657.847	123.748	1.616.479
KASUS	483	118	60	541
%	0,029	0,018	0,048	0,033

g. Prevalensi Penggunaan Kontrasepsi (CPR)

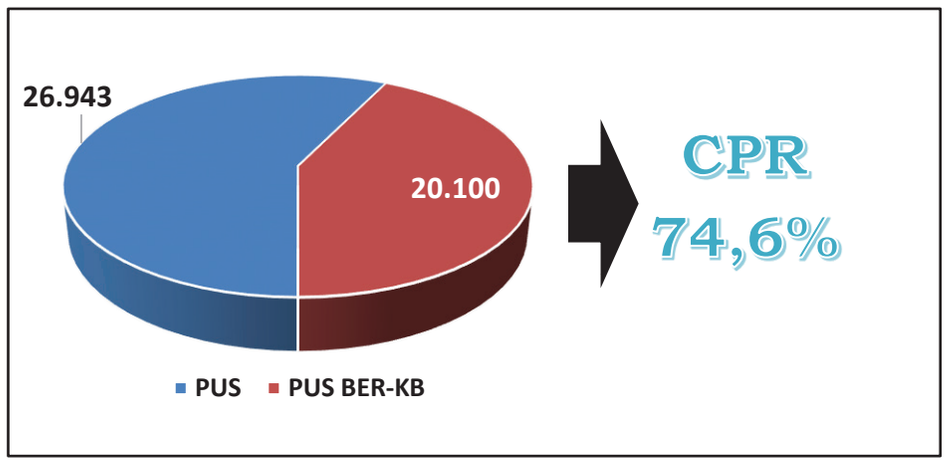

h. Kebutuhan KB Tidak Terpenuhi (PUS Bukan Peserta KB Alasan Ingin Tunda dan Tidak Ingin Anak Lagi)

PUS	PUS TIDAK BER-KB		UNMET NEED	
	INGIN ANAK DITUNDA	TIDAK INGIN ANAK LAGI	JUMLAH	%
205.690	15.459	12.293	27.752	13,5

i. Kesertaan ber-KB Anggota Kelompok Kegiatan (BKB, BKR, BKL, UPPKS)

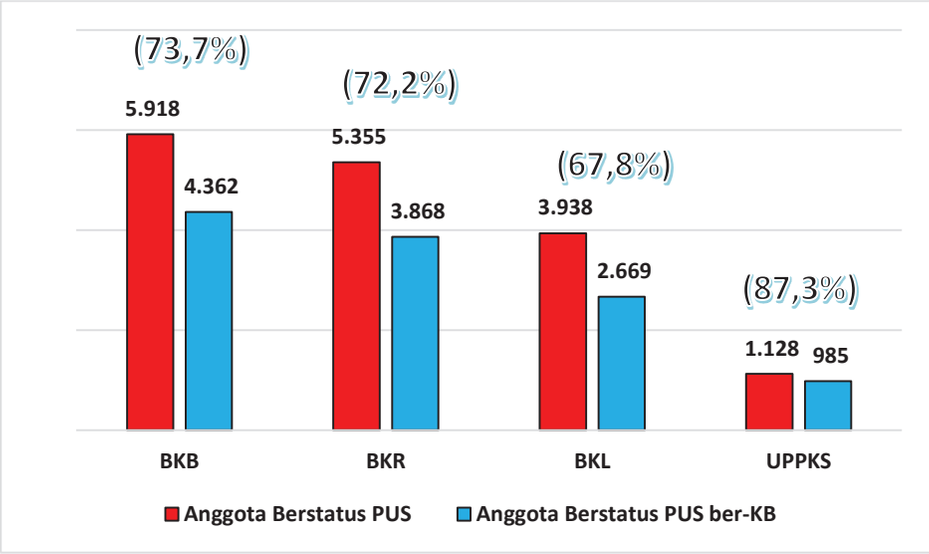

2. INDIKATOR REALISASI ANGGARAN KKBPK

BELANJA TOTAL

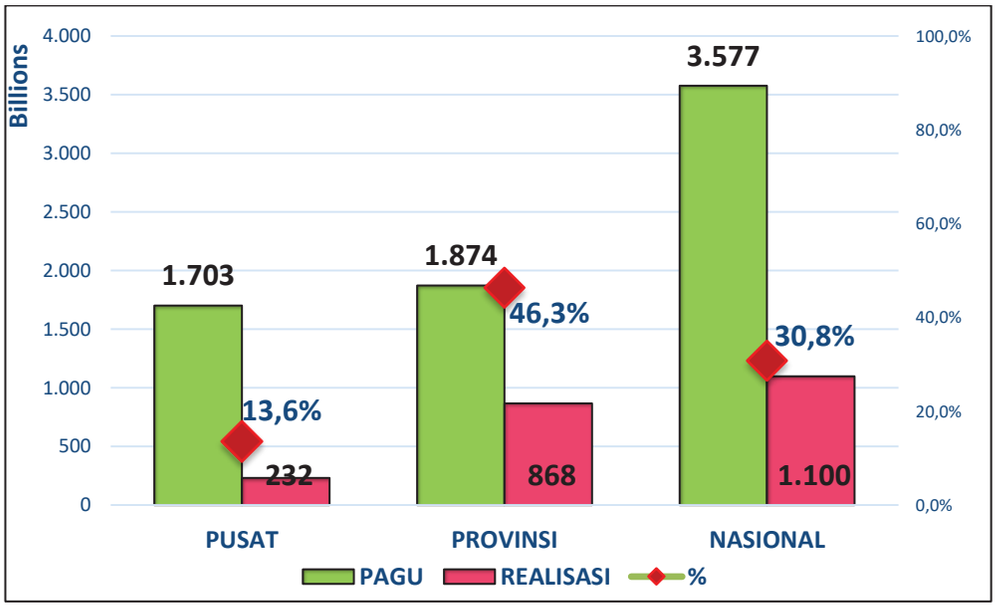

BELANJA PEGAWAI, BELANJA BARANG, BELANJA MODAL

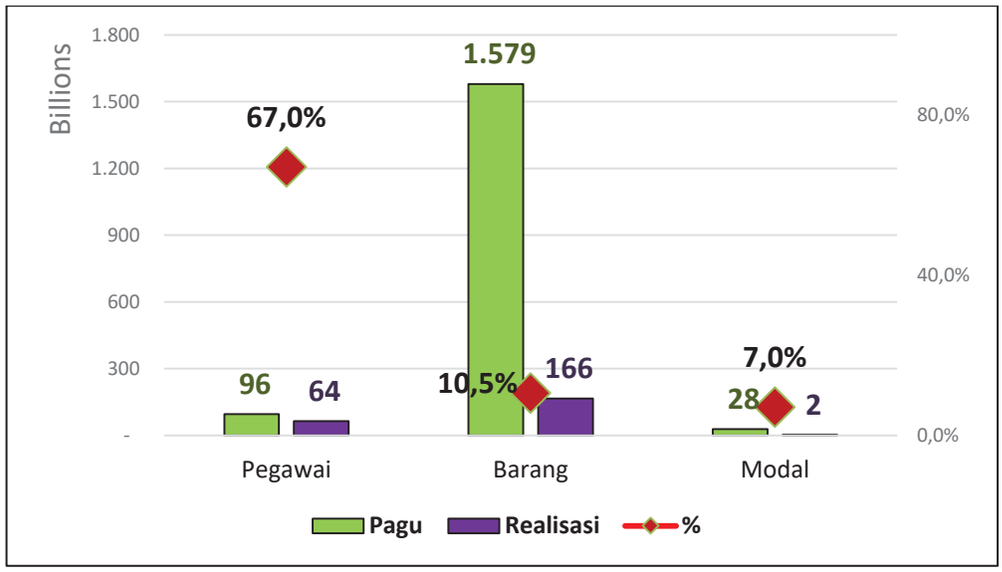

MAK	JENIS BELANJA	PAGU DIPA	REALISASI	%
1	2	3	4	5=(4:3)
51	Belanja Pegawai	95.515.415.000	64.011.395.958	67,0
52	Belanja Barang	1.579.117.557.000	165.955.695.494	10,5
53	Belanja Modal	28.368.937.000	1.989.465.421	7,0
	TOTAL	**1.703.001.909.000**	**231.956.556.873**	**13,6**

PERKIRAAN KEMAMPUAN PERSEDIAAN ALKON

Alat Kontrasepsi	Persediaan di Tingkat Wilayah		Jumlah Persediaan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Pemakaian Rata-rata per Bulan	Rasio Ketersediaan
	Gudang Provinsi	Gudang Kabupaten/Kota			
IUD	5.325	25.362	30.687	7.834	3,9
Kondom	38.610	9.030	47.640	13.024	3,7
Implant	81.720	35.864	117.584	13.668	8,6
Suntik	4.847.500	704.237	5.551.737	811.910	6,8
Pil	287.200	230.030	517.230	857.632	0,6

LAMPIRAN 3

CONTOH **ANALISIS SEDERHANA DATA DAN INFORMASI PROGRAM DAN ANGGARAN KKBPK**

a. INDIKATOR DATA DAN INFORMASI PROGRAM KKBPK

1. Pencapaian PB s.d. September Tahun 2016

ALKON	PPM		PENCAPAIAN			PENC. S.d. SEPTEMBER 2015 THD PPM 2015
	JUMLAH	%MIX	JUMLAH	% THD PPM	% MIX	
IUD	613.540	8,6	360.616	58,8	7,4	224,4
MOW	132.110	1,8	85.899	65,0	1,8	159,0
MOP	15.550	0,2	9.748	62,7	0,2	71,2
KONDOM	349.410	4,9	232.045	66,4	4,8	95,7
IMPLANT	1.026.790	14,4	540.680	52,7	11,1	161,7
SUNTIK	3.174.200	44,4	2.524.872	79,5	51,7	67,6
PIL	1.840.770	25,7	1.125.382	61,1	23,1	46,0
TOTAL	7.152.370	100,0	4.879.242	68,2	100,0	68,4
PRIA	364.960	5,1	241.793	66,3	5,0	94,8
WANITA	6.787.410	94,9	4.637.449	68,3	95,0	67,3
MKJP	1.787.990	25,0	996.943	55,8	20,4	178,3

Berdasarkan laporan Pelayanan KB sampai dengan September 2016, pencapaian Peserta KB Baru Total sebesar 4.879.242 PB atau sebesar 68,2% dari PPM. Pencapaian ini masih belum mencapai target yang seharusnya dicapai yaitu 75,0%. Sama halnya untuk pencapaian PB Pria, PB Wanita dan PB MKJP, tidak ada yang melebihi PPM. Jika dilihat dari masing-masing metode kontrasepsi, dari 7 metode kontrasepsi, hanya pencapaian PB Suntik yang melebihi PPM yaitu 79,5%.

Dibandingkan dengan persentase pencapaian sampai dengan September 2015, maka pencapaian PB sampai dengan September 2016 berbeda jauh, terutama untuk pencapaian PB IUD, MOW dan Implant. Hanya pencapaian PB Suntik dan Pil yang lebih besar dari tahun sebelumnya. Perlu dilihat lebih lanjut penyebabnya, ada kemungkinan secara absolut pencapaian memang lebih rendah, atau kemungkinan penentuan PPM yang terlalu tinggi.

Dilihat dari mix kontrasepsi, PB Suntik masih mendominasi, yaitu 51,7%. Sedangkan yang mempunyai kontribusi paling kecil adalah PB MOP yaitu 0,2%. Untuk mix PB MKJP masih mencapai 20,4%, yang artinya belum

mencapai mix target yaitu 25,0%. Hal ini menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan untuk menjaring PB MKJP perlu dibenahi.

2. Kontribusi PA Mix Kontrasepsi

NO	PROVINSI	IUD	MOW	MOP	KONDOM	IMPLANT	SUNTIK	PIL
1	Wilayah A	3	6	7	5	4	1	2
2	Wilayah B	3	5	7	6	4	1	2
3	Wilayah C	4	5	7	6	3	1	2
4	Wilayah D	2	6	7	5	4	1	3
5	Wilayah E	3	5	7	6	4	1	2
6	Wilayah F	4	6	7	5	3	1	2
7	Wilayah G	1	4	7	5	6	2	3
8	Wilayah H	5	6	7	3	4	1	2
9	Wilayah I	4	6	7	5	3	1	2
10	Wilayah J	4	6	7	5	3	1	2
11	Wilayah K	5	6	7	4	3	1	2
12	Wilayah L	4	6	7	5	3	1	2
13	Wilayah M	4	6	7	5	3	1	2
14	Wilayah N	4	5	7	6	2	1	3
15	Wilayah O	3	6	7	5	4	1	2
16	Wilayah P	5	6	7	4	3	2	1
17	Wilayah Q	4	6	7	5	3	1	2
18	Wilayah R	4	6	7	5	3	1	2
19	Wilayah S	4	5	7	6	2	1	3
20	Wilayah T	5	6	7	4	3	1	2
21	Wilayah U	4	6	7	5	3	1	2
22	Wilayah V	4	6	7	5	3	1	2
23	Wilayah W	4	6	7	5	3	1	2
24	Wilayah X	3	6	7	4	5	1	2
25	Wilayah Y	3	5	7	6	2	1	4
26	Wilayah Z	5	6	7	4	3	1	2
27	Wilayah AA	3	6	7	5	4	1	2
28	Wilayah AB	4	5	7	6	3	1	2
29	Wilayah AC	5	6	7	4	3	1	2
30	Wilayah AD	4	6	7	5	3	1	2
31	Wilayah AE	5	6	7	4	2	1	3
32	Wilayah AF	6	4	7	5	3	1	2
33	Wilayah AG	5	6	7	3	4	1	2
NASIONAL		4	5	7	6	3	1	2

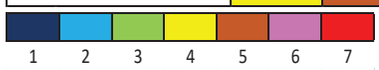

Menunjukkan Urutan Besarnya Kontribusi Terhadap Total PA

Berdasarkan laporan Pengendalian Lapangan bulan September 2016, kontribusi pencapaian PA masih didominasi oleh Suntik, kecuali untuk 2 provinsi yaitu Wilayah G dan Wilayah P. Sedangkan yang kontribusi paling rendah adalah MOP, baik secara nasional atau 33 provinsi.

Untuk Wilayah G, kontribusi paling tinggi yaitu IUD. Sedangkan untuk Wilayah P kontribusi paling tinggi adalah Pil.

Metode kontrasepsi Implant, juga memberikan kontribusi yang cukup tinggi untuk PA. Begitu juga IUD, walaupun tidak setinggi Implant. Perlu strategi yang lebih baik kedepannya untuk meningkatkan kesertaan KB MKJP.

3. Pembinaan Kelompok Kegiatan

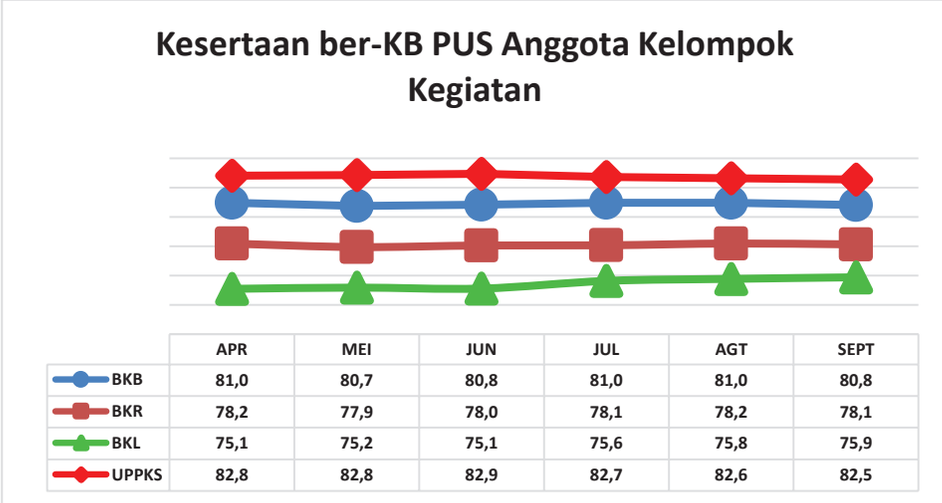

	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT
BKB	81,0	80,7	80,8	81,0	81,0	80,8
BKR	78,2	77,9	78,0	78,1	78,2	78,1
BKL	75,1	75,2	75,1	75,6	75,8	75,9
UPPKS	82,8	82,8	82,9	82,7	82,6	82,5

Kesertaan ber-KB di kelompok kegiatan BKB, BKR, BKL dan UPPKS selama bulan April s.d. September 2016 paling tinggi ada pada kelompok UPPKS, kedua kelompok BKB, kemudian kelompok BKR dan yang terakhir adalah BKL.

Secara pencapaian, tidak mengalami kenaikan yang signifikan dari keempat kelompok, hanya berkisar antara 75,0% s.d. 85,0%. Kesertaan ber-KB dari keempat kelompok kegiatan paling rendah ada pada kelompok BKL di bulan April dan Juni, sedangkan palig tinggi ada pada kelompok UPPKS di bulan Juni.

b. INDIKATOR REALISASI ANGGARAN KKBPK DAN STOK ALAT KONTRASEPSI

1. Realisasi Anggaran

MAK	JENIS BELANJA	PAGU DIPA	REALISASI	%
1	2	3	4	5=(4:3)
51	Belanja Pegawai	95.515.415.000	64.011.395.958	67,0
52	Belanja Barang	1.579.117.557.000	165.955.695.494	10,5
53	Belanja Modal	28.368.937.000	1.989.465.421	7,0
	TOTAL	**1.703.001.909.000**	**231.956.556.873**	**13,6**

Sampai dengan September 2016, realisasi anggaran masih mencapai 231.956.556.873 dari pagu 1.703.001.909.000 atau 13,62%. Pencapaian ini masih sangat kecil jika dilihat dari target yang seharusnya dicapai pada bulan

September 2016. Perlu ditindaklanjuti penyebab rendahnya realisasi anggaran secara total.

Jika dilihat dari masing-masing anggaran belanja, maka persentase tertinggi ada pada realisasi belanja pegawai yaitu 67,02%. Untuk belanja barang dan modal realisasinya sangat kecil, yaitu 10,5% dan 7,0%. Perlu ditindaklanjuti penyebab masalahnya, apakah ada kemungkinan disebabkan pengadaan yang tertunda atau sebagainya.

PERKIRAAN KEMAMPUAN PERSEDIAAN ALKON

Alat Kontrasepsi	Persediaan di Tingkat Wilayah		Jumlah Persediaan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Pemakaian Rata-rata per Bulan	Rasio Ketersediaan
	Gudang Provinsi	Gudang Kabupaten/Kota			
IUD	5.325	25.362	30.687	7.834	3,9
Kondom	38.610	9.030	47.640	13.024	3,7
Implant	81.720	35.864	117.584	13.668	8,6
Suntik	4.847.500	704.237	5.551.737	811.910	6,8
Pil	287.200	230.030	517.230	857.632	0,6

Rasio ketersediaan alat kontrasepsi di Wilayah C pada bulan September 2016 masih berada pada kondisi aman, kecuali untuk Pil. Ketersediaan alat kontrasepsi dikatakan aman jika mempunyai rasio minimal untuk 3 bulan.

Jika dilihat dari rasio masing-masing alat kontrasepsi, maka rasio paling tinggi adalah Implant yaitu 8,6, artinya ketersediaan Implant di Wilayah C masih mencukupi untuk 8 bulan ke depan. Sedangkan yang perlu segera ditambah ketersediannya adalah Pil karena jumlah Pil sudah tidak bisa memenuhi untuk kebutuhan 1 bulan.

LAMPIRAN 4

CONTOH **RUMUSAN MASALAH DAN TINDAK LANJUT**

NO	PERMASALAHAN TERIDENTIFIKASI	KEMUNGKINAN PENYEBAB MASALAH	RENCANA TINDAK LANJUT	KOMPONEN TERKAIT
1.	Kontribusi MKJP yang rendah	• Kurangnya Advokasi dan KIE • Rasa kurang percaya masyarakat terhadap kualitas alat kontrasepsi • dst	• Mencari metode Advokasi dan KIE yang lebih bisa diterima masyrakat • Peningkatan kualitas alat kontrasepsi • Dst	• Ditvokkom • Ditjalpem
2.	Pencapaian Peserta KB Baru (PB) terhadap target yang rendah	• Kurangnya penyuluhan KB oleh PLKB/PKB/Petugas KB Desa/Kelurahan • Rendahnya cakupan laporan • Besaran target yang kurang sesuai dengan kondisi lapangan • dst	• Peningkatan frekuensi penyuluhan KB • Peningkatan cakupan laporan dengan pendekatan kemitraan • dst	• Ditbinlap • Ditjalpem
3	Realisasi anggaran yang rendah	• Realisasi anggaran yang belum dimasukkan ke dalam aplikasi • dst	• Percepatan penyelesaian laporan keuangan • dst	• Bikub

4	Penyebab rasio ketersediaan alat kontrasepsi rendah	• Stok alkon yang kosong • dst	• Percepatan pengadaan alata kontrasepsi • Distribusi dinamis • dst	• Bikub
dst	dst	dst	dst	dst